



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ANGGARAN 2024



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 dapat disusun dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah, yang merupakan alat kendali dan penilai pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Selain itu LKIP merupakan salah satu instrumen bagi Kepala Daerah untuk memantau dan memacu peningkatan kinerja Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan ini menyajikan pencapaian setiap sasaran strategis Kabupaten Barito Utara sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah sesuai dengan target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Laporan ini juga berisi analisis faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan serta langkah tindak lanjut untuk memenuhi target kinerja di tahun yang akan datang.

Diharapkan laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran pembangunan daerah atas anggaran yang telah diamanahkan kepada Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Selain itu keberadaan LKIP ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi seluruh

Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerja di tahun mendatang.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada semua pihak yang turut berperan aktif memberikan masukan terhadap kesempurnaan Penyusunan LKIP Kabupaten Barito Utara Tahun 2024. Kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia melalui Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Pengawasan yang telah memberikan masukan dan koreksi terhadap dokumen-dokumen SAKIP Kabupaten Barito Utara. Kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan tim penyusun LKIP Kabupaten Barito Utara serta pihak-pihak lain yang terkait.

Muara Teweh, 17 Maret 2025

Pj. BUPATI BARITO UTARA,



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pemerintah Kabupaten Barito Utara berupaya berkomitmen dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*clean and good governance*) dan selalu berorientasi pada hasil sebagaimana tuntutan pada era reformasi sekarang ini. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, akuntabilitas kinerja merupakan salah satu aspek yang sangat penting dan wajib terpenuhi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Pelaporan Kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tahun 2024 merupakan tahun pertama dalam upaya sasaran dan indikator kinerja Kabupaten Barito Utara sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026.

Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 107,08% (predikat Baik Sekali) mengalami peningkatan dibandingkan kinerja tahun 2023 yaitu 106,34%. Hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Barito Utara tahun 2024, yaitu 17 indikator atau 25% bermakna Baik Sekali, 7 indikator atau 28% bermakna Baik dan 1 atau 4% bermakna Cukup.

Dari 25 Indikator Kinerja Utama (IKU), 19 indikator mampu memenuhi/melampaui target 100% dan 6 indikator belum memenuhi target (di bawah 100%). Adapun IKU yang mampu memenuhi target dengan capaian kinerja 100% atau lebih antara lain:

1. Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah
2. Persentase desa/kelurahan blankspot
3. Rata-rata lama sekolah
4. Angka Harapan Hidup
5. PDRB sektor perikanan
6. PDRB sektor perkebunan
7. PDRB sektor koperasi dan usaha kecil menengah
8. PDRB sektor perdagangan
9. PDRB sektor industri
10. Persentase kunjungan wisata
11. Pengeluaran perkapita pertahun
12. Persentase penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mandiri
13. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)
14. Persentase kasus konflik yang tertangani
15. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
16. Angka Prevalensi Stunting
17. Indeks Reformasi Birokrasi
18. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
19. Opini BPK

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang belum mampu mencapai target 100% antara lain:

1. Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik
2. Angka Melek Huruf
3. PDRB sektor pertanian
4. Angka Pengangguran Terbuka
5. Persentase penduduk miskin
6. Nilai SAKIP

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Gambaran Umum Kabupaten Barito Utara	1
1.3 Gambaran Umum Organisasi	5
1.4 Isu Strategis Daerah	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
2.1 Rencana Strategis Tahun 2024-2026	13
2.2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barito Utara	21
2.3 Perjanjian Kinerja Kabupaten Barito Utara Tahun 2024	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	29
3.2 Analisis Capaian Kinerja	47
3.3 Realisasi Anggaran	75
BAB IV PENUTUP	85
4.1 Kesimpulan	85
4.2 Rencana Tindak Lanjut	86
LAMPIRAN	
• Indikator Kinerja Utama	
• Perjanjian Kinerja Kabupaten Barito Utara Tahun 2024	
• Rencana Aksi Tahun 2024	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Luas Daerah Perkecamatan Kabupaten Barito Utara	3
Tabel 2	: Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2024.....	4
Tabel 3	: Jumlah Eselon Sebelum dan Sesudah Penyederhanaan Birokrasi	8
Tabel 4	: Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Indikator	19
Tabel 5	: Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barito Utara Sebelum dan Sesudah Penyesuaian	21
Tabel 6	: Perjanjian Kinerja Kabupaten Barito Utara Tahun 2024.....	25
Tabel 7	: Pengukuran Kinerja Kabupaten Barito Utara Tahun 2022	30
Tabel 8	: Penjelasan/perhitungan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 ..	32
Tabel 9	: Capaian Sasaran Strategis Tahun 2024	39
Tabel 10	: Perbandingan Kinerja Tahun 2023 dan 2024.....	41
Tabel 11	: Perbandingan Kinerja Tahun 2024 dengan Target pada RPD 2024-2026	44
Tabel 12	: Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Provinsi dan Nasional	46
Tabel 13	: Analisis faktor penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja tahun 2024 serta langkah perbaikan/solusi	47
Tabel 14	: Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran serta tingkat efisiensi	63
Tabel 15	: Program penunjang pencapaian target kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Utara.....	68
Tabel 16	: Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan dalam Pencapaian Target Kinerja.....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	:	Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Barito Utara	2
Gambar 2	:	Analisis isu strategis yang menghasilkan permasalahan utama daerah	9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah, yang secara eksternal merupakan alat kendali dan penilai pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah dalam rangka menuju terwujudnya *Good Governance* dan *Clean Governance*. Secara Internal LKIP merupakan salah satu instrumen bagi Kepala Daerah untuk memantau dan memacu peningkatan kinerja Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. LKIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.

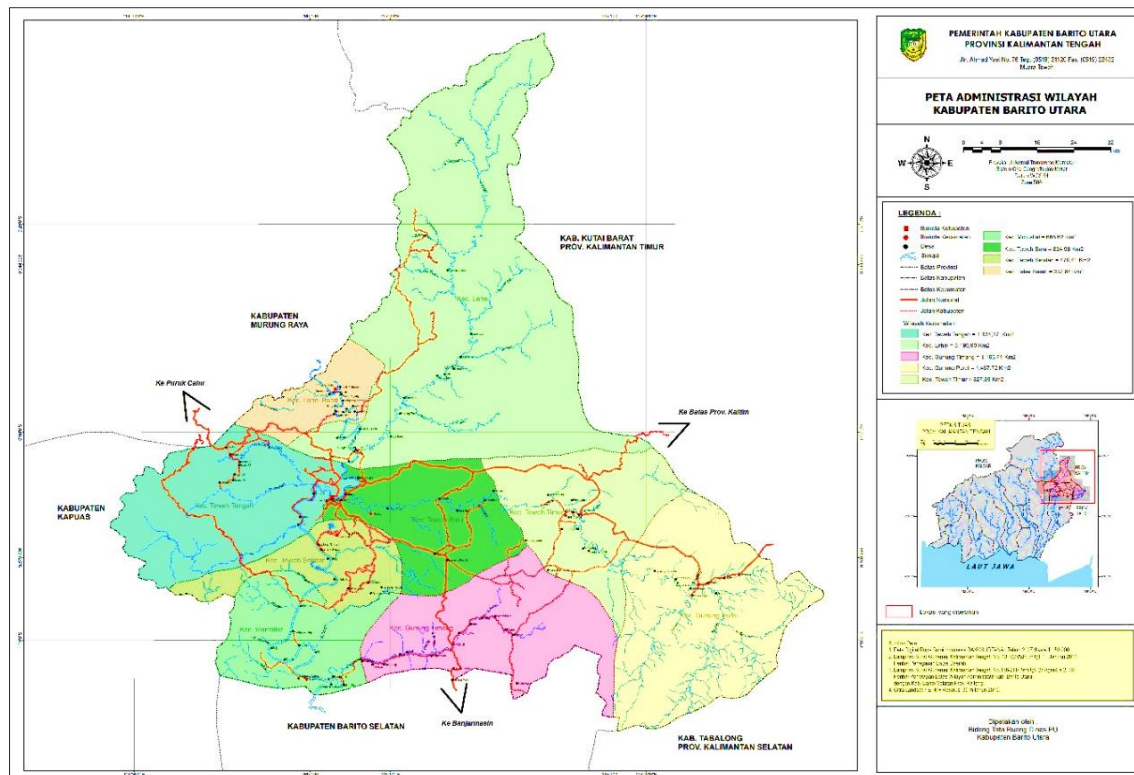
1.2 Gambaran Umum Kabupaten Barito Utara

1.2.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Barito Utara adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang berada di tengah-tengah pulau Kalimantan dan terletak di daerah khatulistiwa yaitu pada posisi 114°27'3,32"–115°50'47" Bujur Timur dan 0°49'00" Lintang Utara–1°27'00" Lintang Selatan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur.

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kapuas dan Murung Raya.



Gambar 1. Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Barito Utara

Luas wilayah Kabupaten Barito Utara secara hukum tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2039 sebagaimana yang dipublikasikan BPS Kabupaten Barito Utara dalam katalog Kabupaten Barito Utara Dalam Angka 2023, luas wilayah Kabupaten Barito Utara adalah 10.152,25 km² atau seluas 6,51% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Secara administrasi pemerintahan, Kabupaten Barito Utara terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan, 93 desa dan 10 kelurahan. Kecamatan yang memiliki wilayah terluas di Kabupaten Barito Utara adalah Kecamatan Lahei dengan luas wilayah 3.219,39 km², atau 31,84% terhadap luas Kabupaten Barito Utara, kemudian Kecamatan

Gunung Purei seluas 1.435,80 km² atau 14,20% dari luas Kabupaten Barito Utara; sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Lahei Barat yaitu 340,26 km² atau 3,36% dari luas Kabupaten Barito Utara.

Tabel 1.

Luas Wilayah Kabupaten Barito Utara Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas (km ²)	Persentase Luas (%)
1	Montallat	Tumpang Laung II	10	694,63	6,87
2	Gunung Timang	Kandui	16	1.066,31	10,54
3	Gunung Purei	Lampeong	11	1.435,80	14,20
4	Teweh Timur	Benangin I	12	921,58	9,11
5	Teweh Tengah	Muara Teweh	10	1.144,40	11,32
6	Teweh Baru	Hajak	10	808,70	8,00
7	Teweh Selatan	Trahean	10	481,17	4,76
8	Lahei	Lahei II	13	3.219,39	31,84
9	Lahei Barat	Benao Hulu	11	340,26	3,36
Barito Utara			103	10.152,25	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2025

Topografi dan morfologi daerah Kabupaten Barito Utara terdiri dari sebelah Selatan ke Timur merupakan dataran agak rendah sedangkan ke arah Utara dengan bentuk daerah lipatan, patahan yang dijajari oleh pegunungan Muller/Schwaner. Bagian wilayah dengan kelerengan 0-2% terletak dibagian selatan tepi Sungai Barito yaitu kecamatan Montallat dan Teweh Tengah seluas 165 km² (29,2%). Bagian wilayah dengan kemiringan 2-15% tersebar di semua kecamatan seluas 4.785 km² (21,5%). Kemiringan 15-40% tersebar di semua kecamatan seluas 4.275 km² (51,5%) dan bagian wilayah dengan kemiringan di atas 40% seluas 2.075 km² (25%).

Berdasarkan keadaan tanah yang ada, maka jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Barito Utara yaitu Aluvial terdapat di aliran sungai, regosol terdapat menyebar di bagian selatan wilayah kabupaten Barito Utara, podsolik merah kuning dengan induk batu-batuan dan batuan beku terdapat di wilayah perbukitan,

kambisol dan okisol (laterit) terdapat di wilayah bagian atas dan paling luas, keadaan bergelombang dan berbukit.

Iklim di Kabupaten Barito Utara termasuk iklim basah, dengan suhu udara berkisar antara 23,4°C sampai dengan 33,5°C. Rata-rata curah hujan tercatat 291 mm³ dan rata-rata hari hujan sebanyak 20 hari setiap bulan. Kelembaban udara rata-rata 84 persen.

Sungai utama yang ada di Kabupaten Barito Utara adalah Sungai Barito. Sungai Barito mengalir dari daerah hulu di Kabupaten Murung Raya melewati Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan, hingga ke Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. Sungai ini tercatat mempunyai panjang lebih kurang 900 km (dapat dilayari 780 km), lebar rata-rata 650 meter dengan kedalaman 8 meter dan bermuara ke Laut Jawa. Selain itu sungai yang cukup berperan dalam sistem hidrologi di Kabupaten Barito Utara adalah sungai Montallat, sungai Teweh dan sungai Lahei yang merupakan anak sungai Barito.

1.2.2 Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Barito Utara pada tahun 2023 berjumlah 160.605 jiwa. Kepadatan penduduk pada tahun 2023 tergolong jarang yaitu 16 jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Teweh Tengah, yaitu sebesar 54 jiwa/km². Hal tersebut dikarenakan ibukota Kabupaten Barito Utara yaitu Muara Teweh yang menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi masyarakat terletak di Kecamatan Teweh Tengah.

Tabel 2.

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2024

No	KECAMATAN	Jumlah Penduduk (jiwa)			Laju pertumbuhan penduduk per tahun 2020-2024 (%)
		2022	2023	2024	
1	Montallat	12.221	12.271	12.316	0,37
2	Gunung Timang	12.772	12.929	13.081	1,24
3	Gunung Purei	2.782	2.798	2.813	0,56
4	Teweh Timur	6.503	6.541	6.576	0,56
5	Teweh Tengah	60.333	61.435	62.524	1,88
6	Teweh Baru	22.761	23.125	23.482	1,64
7	Teweh Selatan	15.533	15.682	15.826	0,96

No	KECAMATAN	Jumlah Penduduk (jiwa)			Laju pertumbuhan penduduk per tahun 2020-2024 (%)
		2022	2023	2024	
8	Lahei	14.012	14.104	14.190	0,64
9	Lahei Barat	11.622	11.720	11.814	0,84
Jumlah		158.539	160.605	162.622	1,32

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2025

Berdasarkan data di dalam katalog Kabupaten Barito Utara Dalam Angka 2025 yang dipublikasikan oleh BPS Kabupaten Barito Utara, penduduk Kabupaten Barito Utara tahun 2024 yang teregistrasi terdiri dari 84.187 jiwa penduduk laki-laki dan 78.435 jiwa penduduk perempuan. Laju pertumbuhan penduduk per tahun 2020-2024 sebesar 1,32%.

1.3 Gambaran Umum Organisasi

Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara.

Dalam perubahan pertama Peraturan Daerah berisi penguatan kedudukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang sebelumnya belum diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016.

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah. Evaluasi kelembagaan dilakukan menyangkut struktur organisasi, budaya organisasi dan inovasi organisasi. Struktur organisasi meliputi besaran organisasi, susunan, perumpunan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah.

Adapun susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah Tipe A
2. Sekretariat DPRD Tipe C
3. Inspektorat Tipe B
4. Dinas Daerah :
 - 1) Dinas Pendidikan Tipe A;
 - 2) Dinas Kesehatan Tipe B;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A;
 - 4) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B;
 - 5) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A;
 - 6) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A;
 - 7) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A;
 - 8) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipe A;
 - 9) Dinas Lingkungan Hidup Tipe A;
 - 10) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B;
 - 11) Dinas Perhubungan Tipe B;
 - 12) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tipe B;
 - 13) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A;
 - 14) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A;
 - 15) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe B;
 - 16) Dinas Pertanian Tipe A;
 - 17) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe B;
 - 18) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe C; dan
 - 19) Satuan Polisi Pamong Praja dan Tipe B.
5. Badan Daerah :
 - 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe B;
 - 2) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Tipe A;
 - 3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Tipe A;
 - 4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C;

- 5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A; dan
- 6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A.
6. Kecamatan :
 - 1) Kecamatan Teweh Tengah Tipe A ibu kota di Muara Teweh;
 - a) Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah;
 - b) Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah;
 - 2) Kecamatan Teweh Baru Tipe A ibu kota di Hajak;
 - a) Kelurahan Jingah Kecamatan Teweh Baru;
 - b) Kelurahan Jambu Kecamatan Teweh Baru;
 - 3) Kecamatan Teweh Selatan Tipe A ibu kota di Trahean;
 - 4) Kecamatan Montallat Tipe A ibu kota di Tumpung Laung;
 - a) Kelurahan Tumpung Laung I Kecamatan Montallat;
 - b) Kelurahan Tumpung Laung II Kecamatan Montallat;
 - c) Kelurahan Montallat I Kecamatan Montallat;
 - d) Kelurahan Montallat II Kecamatan Montallat;
 - 5) Kecamatan Gunung Timang Tipe A ibu kota di Kandui;
 - 6) Kecamatan Teweh Timur Tipe A ibu kota di Benangin;
 - 7) Kecamatan Gunung Purei Tipe A ibu kota di Lampeong;
 - 8) Kecamatan Lahei Tipe A ibu kota di Muara Lahei;
 - a) Kelurahan Lahei I Kecamatan Lahei;
 - b) Kelurahan Lahei II Kecamatan Lahei;
 - 9) Kecamatan Lahei Barat Tipe A ibu kota di Benao;

Jumlah Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas sebanyak 20 (termasuk Satpol PP);
2. Badan sebanyak 6;
3. Sekretariat Daerah sebanyak 1;
4. Sekretariat DPRD sebanyak 1;
5. Inspektorat sebanyak 1; dan
6. Kecamatan sebanyak 9, termasuk 10 Kelurahan.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi,

Pemerintah Kabupaten Barito Utara menindaklanjuti dengan melakukan penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah.

Desain Penyederhanaan Struktur Organisasi (PSO) diusulkan melalui Surat Bupati Barito Utara No.065/47/RG tanggal 28 Juni 2021 mendapatkan pengantar dari Gubernur Kalimantan Tengah No.060/290/ORG dan mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri melalui surat No.061/4250/OTDA Hal Pertimbangan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah.

Saat ini struktur organisasi untuk 26 Perangkat Daerah yang mengalami penyederhanaan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Utara tentang SOTK perangkat daerah masing-masing. Penyederhanaan Struktur Organisasi selanjutnya ditindaklanjuti dengan penyetaraan jabatan dari pejabat struktural ke jabatan fungsional.

Penyetaraan jabatan telah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri Sesuai Surat Nomor 800/8498/OTDA tanggal 24 Desember 2021. Jumlah jabatan yang mendapat persetujuan dari Kemendagri untuk disetarakan sebanyak 243 Jabatan. Dilaksanakan pelantikan pejabat eselon IV ke jabatan fungsional pada tanggal 30 Desember 2021 sesuai Keputusan Bupati Barito Utara No 188.45/422/2021.

Adapun perubahan jumlah jabatan eselon sebelum dan sesudah penyederhanaan birokrasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.

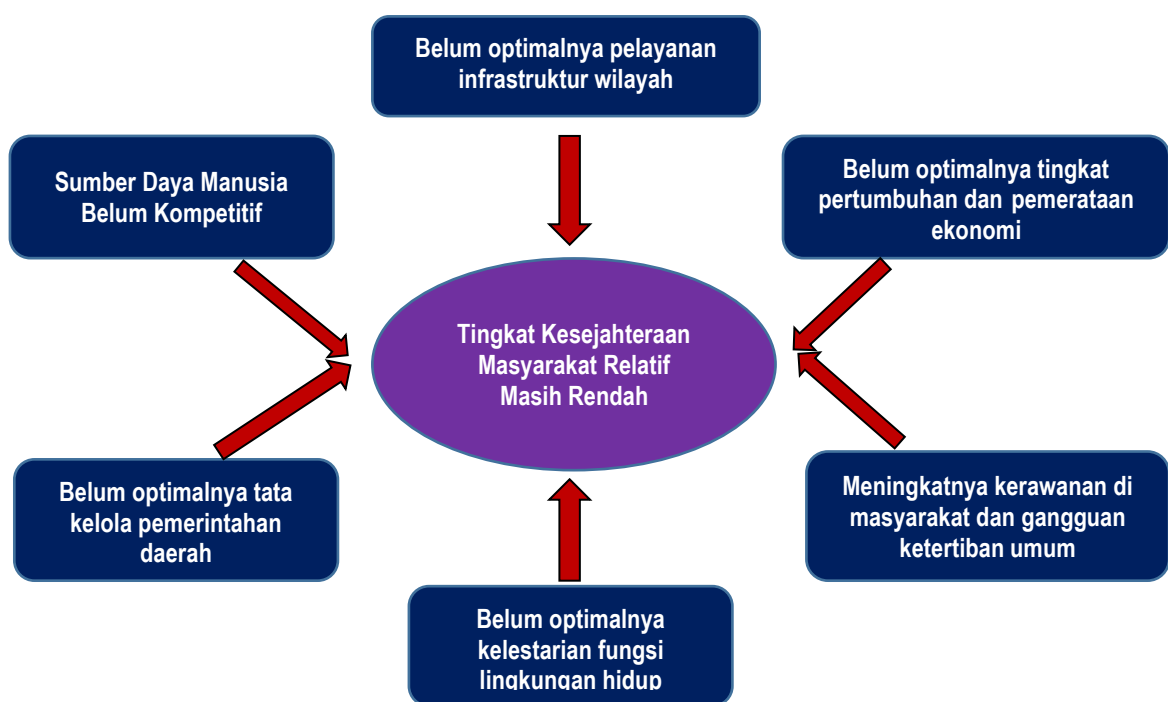
Jumlah Eselon Sebelum dan Sesudah Penyederhanaan Birokrasi

No.	Eselon	Jumlah		Jumlah disederhanakan
		Sebelum	Sesudah	
1	Eselon II a	1	1	-
2	Eselon II b	32	32	-
3	Eselon III a	50	50	-
4	Eselon III b	101	101	-
5	Eselon IV a	446	203	243
6	Eselon IV b	92	92	-
Jumlah		722	479	243

1.4 Isu Strategis Daerah

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Barito Utara yang diperoleh dari analisis permasalahan daerah secara singkat dijabarkan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelayanan infrastruktur wilayah.
2. Sumber Daya Manusia Belum Kompetitif.
3. Belum optimalnya tingkat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.
4. Meningkatnya kerawanan di masyarakat dan gangguan ketertiban umum.
5. Belum optimal kelestarian fungsi lingkungan hidup.
6. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah.



Gambar 2. Analisis Isu Strategis yang menghasilkan permasalahan utama daerah

Masalah utama yang dihadapi oleh Kabupaten Barito Utara adalah tingkat kesejahteraan masyarakat masih rendah. Rendahnya kesejahteraan tersebut bermula dari belum optimalnya pelayanan infrastruktur wilayah karena infrastruktur merupakan barang komplementer yang sangat penting untuk pembangunan ekonomi. Terjaminnya ketersediaan infrastruktur dapat mendorong kegiatan ekonomi wilayah dan peningkatan pendapatan per kapita. Pembangunan ekonomi

tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pendapatan tetapi memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan.

Dengan adanya pembangunan infrastruktur, kesenjangan antar wilayah dapat diminimalisasi, namun untuk memadukan pembangunan infrastruktur maka dilakukan pendekatan pembangunan melalui wilayah pertumbuhan. Membangun infrastruktur saat ini harus berbasis kewilayahan, sehingga pembangunan infrastruktur tidak sekedar dalam bentuk fisik saja, tapi membangun kawasan yang terkoneksi satu sama lain. Kemudian juga suatu kawasan digali potensi yang ada, sehingga dapat berkembang dan juga memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh Barito Utara akan memajukan daerah, menggerakkan ekonomi lokal, mengurangi ketimpangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat persatuan dan kesatuan.

Sejumlah kendala membuat lambatnya pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat Barito Utara seperti kualitas sumber daya manusia yang belum kompetitif, kelembagaan dan struktur sosial ekonomi dan ketersediaan infrastruktur yang kurang mendukung. Sebagai daerah yang memiliki sumber daya alam yang cukup potensial tetapi belum bisa mendatangkan rata-rata tingkat pertumbuhan pendapatan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat karena berbagai permasalahan salah satunya adalah kualitas sumber daya manusia yang belum kompetitif. sumberdaya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam proses pembangunan. Pada era globalisasi dan otonomi daerah. Sumberdaya manusia yang unggul dan berkualitas merupakan syarat penting bagi tercapainya pembangunan ekonomi. Pendidikan yang didukung oleh kesehatan dan fasilitas infrastruktur yang baik memegang peranan penting bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Peningkatan kualitas pendidikan memiliki makna bagi perbaikan kualitas bangsa, sebagai salah satu sarana dalam meningkatkan potensi dasar yang dimiliki bangsa. Kebijakan fiskal menjadi instrumen penting dalam mengatasi permasalahan pembangunan. Peningkatan pengeluaran kesehatan dan pendidikan dapat meningkatkan akumulasi aset/modal SDM (*human capital*). Penanganan SDM sebagai *human capital* menunjukkan bahwa hasil dari investasi non fisik jauh lebih tinggi dibandingkan investasi berupa pembangunan fisik. Peningkatan *human capital* diharapkan dapat meningkatkan produktivitas

tenaga kerja serta dapat mendorong kinerja perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat memutus rantai kemiskinan. Kedepannya Kabupaten Barito Utara harus mengutamakan aspek pembangunan sumber daya manusia yang memiliki tiga pilar utama yaitu pendidikan, kesehatan serta pembangunan kehidupan beragama, sosial dan budaya.

Hal lain yang sangat berpengaruh kepada tingkat kesejahteraan masyarakat adalah belum optimalnya tingkat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Karena meskipun pertumbuhan ekonomi di Barito Utara dari tahun ke tahun terjadi pertumbuhan yang positif, namun pertumbuhan yang diraih masih belum mencerminkan tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat, dengan kata lain belum ada pemerataan kesejahteraan.

Menggapai pertumbuhan ekonomi berkualitas menjadi tantangan tersendiri bagi Kabupaten Barito Utara, pertumbuhan ekonomi suatu daerah pada dasarnya akan berkualitas, jika pertumbuhan ekonominya berkontribusi menekan berkurangnya jumlah penduduk miskin. Pertumbuhan ekonomi berkualitas juga tercermin dari aktivitas perekonomian yang mampu memberikan pemerataan pendapatan masyarakat, serta mendorong tumbuhnya lapangan kerja baru yang memiliki daya serap yang tinggi terhadap pertumbuhan tenaga kerja. Fokus pada pertumbuhan ekonomi berkualitas penting karena secara empiris berkorelasi positif terhadap penurunan angka kemiskinan, penciptaan lapangan kerja serta peningkatan indikator kesejahteraan lainnya. Secara sederhana kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan tersebut ditandai oleh tiga hal yang fundamental. Pertama, semakin berkurangnya jumlah penduduk miskin Kedua, semakin kecilnya jumlah penduduk usia produktif yang masih menganggur. Ketiga, semakin mengecilnya kesenjangan ekonomi antar sesama masyarakat di suatu daerah.

Kondisi keamanan dan ketertiban di Barito Utara harus ditingkatkan kualitasnya, dengan peningkatan penegakan perda, dan peningkatan pelayanan perijinan (kemudahan akses, transparan dan cepat) karena kondisi yang tentram dan tertib menjadi salah satu prasyarat utama bagi kelangsungan pembangunan akan sangat berpengaruh kepada tingkat kemandirian untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Melestarikan lingkungan hidup merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi dan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemimpin

daerah saja, melainkan tanggung jawab setiap masyarakat. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Sekecil apa pun usaha yang kita lakukan sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi anak cucu kita kelak. Upaya pemerintah untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur bagi rakyatnya tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan ditindaklanjuti dengan menyusun program pembangunan berkelanjutan yang sering disebut sebagai pembangunan berwawasan lingkungan. Kedepannya pemerintah Kabupaten Barito Utara agar lebih memperhatikan efek negatif Pembangunan, karena yang merasakan dampak negatif langsung adalah masyarakat, terutama masyarakat miskin.

Tata kelola pemerintahan dari segi ekonomi sangat berdampak kepada tingkat kesejahteraan, bahwa suatu daerah telah mencapai tata kelola yang baik apabila telah berhasil menyelenggarakan sistem pengaturan pembangunan daerah yang kuat, serta bertanggung jawab, dengan tetap beriringan dengan prinsip demokrasi dan prinsip pasar yang efisien. Di samping itu, dalam tata kelola pemerintah yang baik akan menghindari kesalahan dalam alokasi dana pembangunan, termasuk penanggulangan dini tindak pidana korupsi. *Good governance* juga akan menjalankan anggaran secara disiplin sehingga aktivitas usaha rakyat dapat tumbuh dengan baik.

Pemerintahan yang baik adalah baik dalam proses maupun hasilnya. Semua unsur dalam pemerintahan bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, memperoleh dukungan dari masyarakat, serta terbebas dari gerakan-gerakan anarkis yang bisa menghambat proses dan laju pembangunan. Pemerintahan juga bisa dikatakan baik jika produktif dan memperlihatkan hasil dengan indikator kemampuan ekonomi masyarakat meningkat, baik dalam aspek produktivitas maupun dalam daya belinya; kesejahteraan spiritualnya meningkat dengan indikator rasa aman, bahagia, dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2024-2026

Rencana Strategis Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 tertuang dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 ini dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Barito Utara pada masa transisi sampai dengan tersedianya Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara hasil Pilkada Serentak Tahun 2024. Disamping itu, RPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 ini juga digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 yang merupakan masa transisi pasca Pilkada Serentak Tahun 2024.

Pedoman transisi dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah pada akhir periode Dokumen RPD hingga terpilihnya kepala daerah baru dan tersedianya dokumen RPJMD sebagai hasil penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih. Pedoman transisi ini juga dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih siap dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya, sehingga tidak terjadi kekosongan pedoman perencanaan pembangunan, sebagai upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan ketersediaan dokumen rencana pembangunan.

2.1.1 Visi

Sesuai Intruksi Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota, analisa

pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahap keempat dan isu strategis actual.

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2005–2025 merupakan pedoman pembangunan dalam jangka waktu 20 tahun. Mengacu kepada hal tersebut maka periode Tahun 2024-2026 ini adalah merupakan periode keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Selatan 2005-2025 yang memiliki Visi untuk mewujudkan **“Barito Utara yang Sejahtera, Maju, Adil dan Mandiri”** .

2.1.2 Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Barito Utara yang telah ditetapkan diatas, maka ditetapkan Misi Pembangunan Kabupaten Barito Utara 2005-2025 sebagai berikut:

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas.

Manusia adalah modal utama pembangunan dan yang akan menikmati hasil pembangunan. Manusia yang berkualitas akan tercipta melalui pembangunan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian serta keagamaan. Karenanya pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan harus dapat menjamin bahwa tingkat perekonomian masyarakat tidak menjadi kendala utama bagi masyarakat untuk memperolehnya. Perekonomian yang maju secara merata diberbagai daerah akan memacu dan memberi peluang untuk dapat memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan berkualitas. Pembangunan bidang pendidikan harus disertai dan dilengkapi dengan pembangunan keagamaan yang berkualitas sehingga terjamin bahwa manusia yang terbangun di Kabupaten Barito Utara adalah manusia dengan kualitas keahlian, keterampilan yang berkualitas lebih baik serta memiliki keimanan serta taqwa (Imtaq) kepada Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu pembangunan sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Barito Utara yang maju, mandiri, adil dan sejahtera, sehingga memiliki daya saing dalam era globalisasi. Dalam kaitan itu, pembangunan sumber daya manusia dimaksudkan untuk menanggulangi kemiskinan dan diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia

yang antara lain ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kesehatan yang semakin meningkat, semakin berperannya perempuan dan generasi muda dalam pembangunan daerah. Pencapaian indikator Milenium Development Goal (MDGs) adalah menjadi tujuan utama yang harus diperhatikan untuk mensejajarkan bahkan melampaui prestasi yang diperoleh oleh Kabupaten lainnya di Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Membangun Infrastruktur Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Antar Wilayah.

Akses dan perhatian terhadap infrastruktur untuk kawasan perbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur diperhatikan dengan seksama sehingga wilayah perbatasan mempunyai akses yang lebih baik untuk mencapai daerah Kabupaten Barito Utara lainnya dan Provinsi Kalimantan Tengah pada umumnya. Oleh karena itu pembukaan isolasi daerah dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan berkualitas sehingga mendukung kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah. Untuk itu, pembangunan transportasi dilaksanakan dengan mengembangkan jaringan pelayanan secara antarmoda dan intramoda; Sarana dan prasarana yang dikembangkan dapat bersifat massif, cepat dan sebanyak mungkin mengakomodasi kepentingan masyarakat, mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penyediaan pelayanan; meningkatkan iklim kompetisi secara sehat agar dapat meningkatkan efisiensi dan memberikan alternatif bagi pengguna jasa dengan tetap mempertahankan keberpihakan pemerintah sebagai regulator terhadap pelayanan umum yang terjangkau kepada masyarakat.

3. Memperkuat Perimbangan dan Daya Saing Perekonomian Daerah.

Pengembangan perekonomian yang berimbang pada berbagai daerah di Kabupaten Barito Utara sesuai potensinya akan memberikan pondasi yang kuat bagi pengembangan perekonomian Daerah yang kuat pada masa-masa mendatang. Oleh karena itu perekonomian daerah dikembangkan dengan memperkuat perekonomian daerah serta berorientasi dan berdaya saing global. Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis

keunggulan komparatif sumber daya alam menjadi perekonomian yang berkeunggulan kompetitif. Interaksi antar daerah didorong dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan antar daerah yang kokoh. Pembangunan perekonomian untuk daerah perbatasan dengan Kalimantan Timur harus dilakukan dengan lebih seksama karena nampaknya kawasan ini adalah kawasan yang harus mendapat perhatian lebih dari sebelumnya agar perekonomian pada seluruh daerah yang berbatasan dengan Kalimantan Timur berkembang secara berimbang dengan daerah lainnya di Kabupaten Barito Utara. Untuk itu peran sektor industri manufaktur sebagai penggerak utama laju pertumbuhan harus semakin ditingkatkan, baik dalam segi penghasilan, sumbangan dalam penciptaan pendapatan maupun dalam penyerapan tenaga kerja. Upaya tersebut dilakukan dengan prinsip-prinsip dasar: mengelola peningkatan produktivitas melalui inovasi, penguasaan, penelitian, pengembangan dan penerapan iptek menuju ekonomi berbasis pengetahuan serta kemandirian dan ketahanan daerah secara berkelanjutan; mengelola kelembagaan ekonomi termasuk jasa keuangan yang melaksanakan praktik terbaik dan pemerintahan yang baik secara berkelanjutan, dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

4. Mewujudkan Kabupaten Barito Utara Sejahtera dan Lestari.

Kesejahteraan yang ingin diwujudkan adalah kesejahteraan yang bertumpu dan dibangun atas prinsip keberlanjutan, baik yang menyangkut sumberdaya alam, manusia dan modal. Oleh karena itu melalui misi ini pengelolaan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Barito Utara harus mampu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi. Upaya untuk meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan harus dibarengi dengan memperbaiki tatacara pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk yang mendukung perbaikan kualitas kehidupan manusia secara berkelanjutan seraya terus memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan dengan terus meningkatkan

pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan. Sumberdaya manusia yang ada harus terus ditingkatkan kualitasnya sehingga mampu memanfaatkan sumberdaya alam yang ada secara lestari dan bernilai tambah tinggi yang juga berarti akan menghasilkan kegiatan perekonomian yang lebih efisien yang dengan demikian harus dibarengi dengan pengembangan akses yang lebih mudah bagi semua masyarakat pada berbagai daerah untuk memperoleh modal.

5. Mewujudkan Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.

Pemerataan pembangunan pada seluruh wilayah Kabupaten Barito Utara diwujudkan dengan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah dan infrastruktur yang mendukung untuk berkembangnya potensi dimaksud. Secara khusus untuk daerah perbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur dilakukan dengan melakukan pengembangan potensi yang sinergis dengan pengembangan potensi yang dilakukan pada oleh Kabupaten dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu perwujudan dari misi ini adalah dengan meningkatkan pembangunan daerah secara berimbang sesuai kebutuhan riil daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, mengembangkan keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dilakukan secara terencana dengan menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi seraya terus menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk isu yang berhubungan dengan gender. Kapasitas pemerintah daerah terus dikembangkan melalui peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah, kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, kapasitas keuangan pemerintah daerah, serta kapasitas lembaga legislatif daerah. Selain itu perhatian yang lebih besar harus diberikan untuk daerah perbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka untuk memberikan rasa kebersamaan sebagai warga Kabupaten Barito Utara dan Provinsi Kalimantan Tengah.

2.1.3 Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam masa transisi. Rumusan tujuan dalam setiap misi menggambarkan pula kondisi yang akan di capai dalam merespon isu strategis perencanaan, berpijak dari amanat dan upaya membangun sinkronisasi dengan visi pembangunan jangka panjang, serta dalam rangka menjawab isu strategis aktual yang berkelanjutan dalam pembangunan, maka dirumuskan Tujuan Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

1. Peningkatan Infrastruktur wilayah.
2. Pembangunan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing.
3. Peningkatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pendapatan.
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban pada masyarakat.
6. Pelestarian lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan.
7. Penurunan angka stunting dan kemiskinan
8. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

2.1.4 Sasaran

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan ditetapkan sasaran-sasaran pokok pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah;
2. Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung listrik.
3. Menurunnya desa/kelurahan blankspot.
4. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat
5. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
6. Meningkatnya sektor pertanian.
7. Meningkatnya sektor perikanan.
8. Meningkatnya Sektor perkebunan.
9. Meningkatnya sektor koperasi dan UKM
10. Meningkatnya sektor perdagangan
11. Meningkatnya sektor industri
12. Meningkatnya daya saing pariwisata
13. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja

14. Meningkatnya daya beli masyarakat
15. Meningkatnya penanganan masalah Kesejahteraan Sosial
16. Meningkatnya ketertiban masyarakat
17. Meningkatnya penanganan konflik
18. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
19. Menurunnya stunting
20. Menurunnya kemiskinan
21. Meningkatnya penerapan Reformasi Birokrasi
22. Meningkatnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
23. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
24. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah

Tabel 4.
Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Indikator

Tujuan	Sasaran	Indikator
Peningkatan Infrastruktur wilayah.	Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah;	Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah
	Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung listrik.	Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik
	Menurunnya desa/kelurahan blankspot.	Persentase desa/kelurahan blankspot
Pembangunan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing.	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka melek huruf
Peningkatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.	Meningkatnya sektor pertanian	Angka Harapan Hidup
	Meningkatnya sektor perikanan	PDRB sektor pertanian
	Meningkatnya sektor perkebunan	PDRB sektor perikanan
	Meningkatnya sektor koperasi dan UKM	PDRB sektor perkebunan
	Meningkatnya sektor perdagangan	PDRB sektor koperasi dan usaha kecil menengah
	Meningkatnya sektor industri	PDRB sektor perdagangan
		PDRB sektor industri

Tujuan	Sasaran	Indikator
	Meningkatnya daya saing pariwisata	Persentase kunjungan wisata
Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pendapatan.	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Angka pengangguran terbuka
	Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran perkapita pertahun
	Meningkatnya penanganan masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mandiri
Mewujudkan ketentraman dan ketertiban pada masyarakat.	Meningkatnya ketertiban masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)
	Meningkatnya penanganan konflik	Persentase kasus konflik yang tertangani
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Penurunan angka stunting dan kemiskinan	Menurunnya stunting	Angka Prevalensi Stunting
	Menurunnya kemiskinan	Persentase penduduk miskin
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Meningkatnya penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi
	Meningkatnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK
	Meningkatnya penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi

2.2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barito Utara

Dalam rangka memperoleh indikator kinerja utama yang lebih berorientasi hasil (*outcome*) dan memenuhi kriteria SMART dilakukan penyesuaian terhadap rumusan indikator kinerja utama pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

Tabel 5.

Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barito Utara Sebelum dan Sesudah Penyesuaian

IKU pada RPD 2024-2026 (Sebelum Penyesuaian)			Penyesuaian	IKU Sesudah Penyesuaian	
No.	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah	Rumusan sasaran diubah, indikator tetap	Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah	Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah
2	Meningkatnya Infrastruktur perdesaan dan pengembangan jaringan listrik kelistrikan serta energi lainnya	Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik	Rumusan sasaran diubah, indikator tetap	Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung listrik	Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik
3	Berkembangnya jaringan telekomunikasi dan informasi	Persentase desa/kelurahan blankspot	Rumusan sasaran diubah, indikator tetap	Menurunnya desa/kelurahan <i>blankspot</i>	Persentase desa/kelurahan <i>blankspot</i>
4	Meningkatnya minat wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Rata-rata lama sekolah	Rumusan sasaran diubah, indikator tetap	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah
		Angka melek huruf			Angka melek huruf
5	Meningkatnya fasilitas pendidikan dan tenaga pendidik	Rasio tenaga pendidik terhadap murid	Dikeluarkan dari IKU Kabupaten dan dijadikan IKU pada tingkat Dinas		
6	Meningkatnya fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, manajemen dan pelayanan bidang kesehatan	Angka Harapan Hidup	Rumusan sasaran diubah, indikator tetap	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup

IKU pada RPD 2024-2026 (Sebelum Penyesuaian)			Penyesuaian	IKU Sesudah Penyesuaian	
No.	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
7.	Meningkatnya produksi, penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana serta pemasaran hasil pertanian	PDRB sektor pertanian	Rumusan sasaran diubah, indikator tetap	Meningkatnya sektor pertanian	PDRB sektor pertanian
8.	Meningkatnya produksi, penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana serta pemasaran hasil perikanan	PDRB sektor perikanan	Rumusan sasaran diubah, indikator tetap	Meningkatnya sektor perikanan	PDRB sektor perikanan
9.	Meningkatnya produksi, penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana serta pemasaran hasil perkebunan	PDRB sektor perkebunan	Rumusan sasaran diubah, indikator tetap	Meningkatnya sektor perkebunan	PDRB sektor perkebunan
10.	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi, UKM dan peningkatan/ pengembangan perdagangan dan industri	PDRB sektor koperasi dan usaha kecil menengah	Rumusan sasaran diubah dan dipecah menjadi 3, indikator tetap	Meningkatnya sektor koperasi dan UKM	PDRB sektor koperasi dan usaha kecil menengah
		PDRB sektor perdagangan		Meningkatnya sektor perdagangan	PDRB sektor perdagangan
		PDRB sektor industri		Meningkatnya sektor industri	PDRB sektor industri
11.	Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Angka pengangguran terbuka	Dihilangkan dan disinergikan dengan sasaran 13		
		Pendapatan Perkapita Penduduk			
12.	Berkembangnya pemasaran pariwisata, destinasi pariwisata dan kemitraan	Kunjungan wisata	Rumusan sasaran diubah, indikator disempurnakan	Meningkatnya daya saing pariwisata	Persentase kunjungan wisata

IKU pada RPD 2024-2026 (Sebelum Penyesuaian)			Penyesuaian	IKU Sesudah Penyesuaian	
No.	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
13.	Meningkatnya kesempatan kerja dan penciptaan iklim usaha yang kondusif	Angka pengangguran terbuka	Rumusan sasaran diubah, indikator tetap	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Angka pengangguran terbuka
		Pengeluaran perkapita pertahun	Rumusan sasaran ditambahkan, indikator tetap	Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran perkapita pertahun
14.	Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mandiri	Rumusan sasaran diubah, indikator tetap	Meningkatnya penanganan masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mandiri
15.	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan serta penanganan konflik dan pengembangan wawasan kebangsaan dan politik	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)	Rumusan sasaran diubah dan dipecah menjadi 2, indikator tetap	Meningkatnya ketertiban masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)
		Persentase kasus konflik yang tertangani		Meningkatnya penanganan konflik	Persentase kasus konflik yang tertangani
16.	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam serta pengendalian pencemaran/perusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	Rumusan sasaran diubah; indikator disederhanakan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
		Indeks Kualitas Udara			
		Indeks Kualitas Tanah			
17.	Menurunnya Angka Stunting	Persentase menurunnya angka stunting	Rumusan sasaran dan indikator disempurnakan	Menurunnya stunting	Angka Prevalensi Stunting

IKU pada RPD 2024-2026 (Sebelum Penyesuaian)			Penyesuaian	IKU Sesudah Penyesuaian	
No.	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
18.	Menurunnya angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim	Persentase menurunnya kemiskinan dan kemiskinan ekstrim	Rumusan sasaran dan indikator diubah	Menurunnya kemiskinan	Persentase penduduk miskin
19.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan	Indeks Reformasi Birokrasi	Rumusan sasaran diubah; indikator tetap	Meningkatnya penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi
20.	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	Rumusan sasaran diubah; indikator tetap	Meningkatnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP
21.	Meningkatnya Pengelolaan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Rumusan sasaran diubah; indikator tetap	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
22.	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah berbasis elektronik	Opini BPK	Rumusan sasaran diubah; indikator tetap	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK
23.	Pengembangan produksi dan hilirisasi komoditas unggulan daerah	PDRB sektor pertanian PDRB sektor perikanan PDRB sektor perkebunan	Tidak dimasukkan, disinergikan dengan sasaran 7, 8 dan 9		
24.	Pengembangan akses infrastruktur menuju Ibu Kota Nusantara (IKN)	Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah	Tidak dimasukkan, disinergikan dengan sasaran 1		
25.	Pengembangan Industri dan Perdagangan mendukung Ibu Kota Nusantara (IKN)	PDRB sektor koperasi dan usaha kecil menengah PDRB sektor perdagangan PDRB sektor industri	Tidak dimasukkan, disinergikan dengan sasaran 10		

2.3 Perjanjian Kinerja Kabupaten Barito Utara Tahun 2024

Perencanaan Kinerja Tahun 2024 telah dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja Kabupaten Barito Utara yang disusun berdasarkan target pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang telah ditandatangani oleh Bupati Barito Utara pada tanggal 17 Januari 2024. Sesuai dengan hasil penyesuaian pada rumusan IKU, maka juga dilakukan penyesuaian Perjanjian Kinerja Kabupaten Barito Utara Tahun 2024.

Tabel 6.
Perjanjian Kinerja Kabupaten Barito Utara Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target
1.	Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah	Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah	%	92,23
2.	Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung listrik	Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik	%	95,15
3.	Menurunnya desa/kelurahan blankspot	Persentase desa/kelurahan blankspot	%	0,00
4.	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,61
		Angka melek huruf	%	99,7
5.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,32
6.	Meningkatnya sektor pertanian	PDRB sektor pertanian	Juta rupiah	672.597,9
7.	Meningkatnya sektor perikanan	PDRB sektor perikanan	Juta rupiah	191.262,8
8.	Meningkatnya sektor perkebunan	PDRB sektor perkebunan	Juta rupiah	397.068,6
9.	Meningkatnya sektor koperasi dan UKM	PDRB sektor koperasi dan usaha kecil menengah	Juta rupiah	160.676,1
10.	Meningkatnya sektor perdagangan	PDRB sektor perdagangan	Juta rupiah	750.936,7
11.	Meningkatnya sektor industri	PDRB sektor industri	Juta rupiah	986.408,6
12.	Meningkatnya daya saing pariwisata	Persentase kunjungan wisata	%	80
13.	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Angka pengangguran terbuka	%	3,43
14.	Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran perkapita pertahun	Juta rupiah	9.993

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target
15.	Meningkatnya penanganan masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mandiri	%	22,05
16.	Meningkatnya ketertiban masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)	%	87,5
17.	Meningkatnya penanganan konflik	Persentase kasus konflik yang tertangani	%	80
18.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	73,64
19.	Menurunnya stunting	Angka Prevalensi Stunting	%	16,21
20.	Menurunnya kemiskinan	Persentase penduduk miskin	%	5,08
21.	Meningkatnya penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori (nilai)	B (60,01)
22.	Meningkatnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	Kategori (nilai)	B (65)
23.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat (nilai)	B (77)
24.	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	Predikat (opini ke-)	WTP (1)

No.	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penyelenggaraan Jalan	371.651.936.080
2	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	4.324.192.400
3	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	7.258.288.500
4	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	23.694.054.000
5	Program Pengelolaan Pendidikan	253.475.537.925
6	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	764.959.700
	Program Pengendalian Bahasa dan Sastra	400.000.000
7	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan	78.601.623.031
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	419.211.000
9	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	735.619.000
10	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	417.436.400
11	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	311.315.000
12	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.514.760.824
13	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	107.519.000
14	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil perikanan	206.438.725

No.	Program	Anggaran (Rp)
15.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	38.259.936.075
16.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.	1.504.796.885
17.	Program Perizinan Usaha Pertanian.	714.999.275
18.	Program Penyuluhan Pertanian.	527.512.425
19.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1.500.000.000
20.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.250.109.000
21.	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	2.894.289.250
22.	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	395.159.775
23.	Program Perencanaan dan Pembangunan industri	1.373.016.600
24.	Program Penempatan Tenaga Kerja	126.174.000
25.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	22.216.000
26.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	21.346000
27.	Program Promosi Penanaman Modal Peyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000
28.	Program Pelayanan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	700.000.000
29.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	400.280.000
30.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000
31.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1.800.000.000
32.	Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	762.000.000
33.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	15.000.000
34.	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	50.000.000
35.	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	215.000.000
36.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	20.000.000

No.	Program	Anggaran (Rp)
37.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	70.000.000
38.	Program Pengelolaan Persampahan	19.778.650.000
39.	Program Pemasaran Pariwisata	24.920.000
40.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2.957.606.500
41.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	538.582.500
42.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	9.154.458.000
43.	Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat	335.000.000
44.	Program Peningkatan Keamanan dan Lingkungan	210.066.600
45.	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	275.000.000
46.	Program peningkatan Kewaspadaan Nasional dan peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	2.878.661.500
47.	Program Pemberdayaan Sosial	3.807.800.000
48.	Program Rehabilitasi Sosial	3.301.407.600
49.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	584.692.400
50.	Program Penanganan Bencana	1.941.581.000
51.	Program Penataan Desa	145.000.000
52.	Penataan Administrasi Pemerintahan Desa	1.351.120.625
53.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.789.457.000
54.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	1.497.000.000
55.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.	2.103.313.500
57.	Program Perekonomian dan Pembangunan.	1.205.400.625
58.	Program Kepegawaian Daerah	1.077.096.200
59.	Penyelenggaraan Pengawasan	2.850.000.000
60.	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1.050.000.000
61.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.544.845.175
62.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	896.714.375
63.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	379.115.075
64.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	4.542.428.375
65.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.051.901.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Utara dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja utama (IKU) dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan terget yang telah ditetapkan sehingga akan dikethui celah kinerja (*performance gap*) yang selanjutnya digunakan sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Untuk mengukur capaian kinerja untuk masing-masing indikator digunakan rumus:

1. Tingkat Realisasi Positif:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Tingkat Realisasi Negatif:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Persentase capaian sasaran = rata-rata persentase capaian IKU

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Rentang Capaian	Kategori Capaian
>100%	= Baik Sekali (BS)
>75% - 100%	= Baik (B)
55% - 75%	= Cukup (C)
< 55%	= Kurang (K)

3.1.2 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Pengukuran kinerja untuk masing-masing indikator kinerja tersaji sebagai berikut:

Tabel 7.

Pengukuran Kinerja Kabupaten Barito Utara Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1.	Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah	Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah	%	92,23	100	108,42	Baik Sekali
2.	Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung listrik	Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik	%	95,15	88,35	92,85	Baik
3.	Menurunnya desa/ kelurahan blankspot	Persentase desa/kelurahan blankspot	%	0,00	0,00	100	Baik
4.	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,61	8,92	103,60	Baik Sekali
		Angka melek huruf	%	99,7	98,77	99,07	Baik
5.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,32	71,8	100,67	Baik Sekali
6.	Meningkatnya sektor pertanian	PDRB sektor pertanian	Juta rupiah	672.597,9	631.700,37	93,92	Baik
7.	Meningkatnya sektor perikanan	PDRB sektor perikanan	Juta rupiah	191.262,8	197.131,52	103,07	Baik Sekali
8.	Meningkatnya sektor perkebunan	PDRB sektor perkebunan	Juta rupiah	397.068,6	659.116,09	166,00	Baik Sekali
9.	Meningkatnya sektor koperasi dan UKM	PDRB sektor koperasi dan usaha kecil menengah	Juta rupiah	160.676,1	177.560,14	110,51	Baik Sekali
10.	Meningkatnya sektor perdagangan	PDRB sektor perdagangan	Juta rupiah	750.936,7	915.275,67	121,88	Baik Sekali

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
11.	Meningkatnya sektor industri	PDRB sektor industri	Juta rupiah	986.408,6	1.195.895,94	121,24	Baik Sekali
12.	Meningkatnya daya saing pariwisata	Persentase kunjungan wisata	%	80	80,62	100,77	Baik Sekali
13.	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Angka pengangguran terbuka	%	3,43	4,71	62,68	cukup
14.	Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran perkapita pertahun	ribu/orang /tahun	9.993	11.150	111,58	Baik Sekali
15.	Meningkatnya penanganan masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mandiri	%	22,05	25,06	113,65	Baik Sekali
16.	Meningkatnya ketertiban masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)	%	87,5	100	114,29	Baik Sekali
17.	Meningkatnya penanganan konflik	Persentase kasus konflik yang tertangani	%	80	100	125,00	Baik Sekali
18.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	73,64	75,59	102,65	Baik Sekali
19.	Menurunnya stunting	Angka Prevalensi Stunting	%	16,21	15,3	105,61	Baik Sekali
20.	Menurunnya kemiskinan	Persentase penduduk miskin	%	5,08	5,67	88,39	Baik
21.	Meningkatnya penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori (nilai)	B (60,01)	B (69,07)	115,10	Baik Sekali
22.	Meningkatnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	Kategori (nilai)	B (65)	B (63,74)	98,06	Baik
23.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat (nilai)	B (77)	B (86,36)	112,16	Baik Sekali
24.	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	Predikat (opini ke-)	WTP (1)	WTP (1)	100,00	Baik

3.1.3 Penjelasan/perhitungan realisasi dan capaian masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2024

Penjelasan/perhitungan realisasi dan capaian masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 8.

Penjelasan/perhitungan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Penjelasan Perhitungan/Perolehan Data Realisasi	Perhitungan Capaian (%)
1. Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah	%	$\frac{\text{jumlah desa/ kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah}}{\text{Jumlah desa/kelurahan}} \times 100\%$ $\frac{103}{103} \times 100\% = 100\%$	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$ $= \frac{100}{92,23} \times 100\% = 108,42\%$
2. Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik	%	$\frac{\text{jumlah desa/ kelurahan yang terhubung jaringan listrik}}{\text{Jumlah desa/kelurahan}} \times 100\%$ $\frac{91}{103} \times 100\% = 88,35\%$	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$ $= \frac{88,35}{95,15} \times 100\% = 92,85\%$
3. Persentase desa/kelurahan <i>blankspot</i>	%	$\frac{\text{jumlah desa/ kelurahan blankspot}}{\text{Jumlah desa/kelurahan}} \times 100\%$ Tahun 2024 seluruh desa/kelurahan berjumlah 103 sudah terbebas dari <i>blankspot</i> (0)	Desa/kelurahan yg blankspot ditargetkan 0 atau 100% bebas blankspot. Sehingga Capaian kinerja $= 100\% - 0\% = 100\%$

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Penjelasan Perhitungan/Perolehan Data Realisasi	Perhitungan Capaian (%)
4. Rata-rata lama sekolah	Tahun	Perhitungan Rata-rata lama sekolah dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik. Data BPS, RLS Barut Tahun 2024 = 8,92	$\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$ $= \frac{8,92}{8,61} \times 100\% = 103,60\%$
5. Angka Melek Huruf	%	Perhitungan Angka Melek Huruf dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik. Data BPS, Angka Melek Huruf Barut Tahun 2024 = 98,77	$\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$ $= \frac{98,77}{99,70} \times 100\% = 99,07\%$
6. Angka Harapan Hidup	Tahun	Perhitungan Angka Harapan Hidup dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik. Data BPS Tahun 2023 = 71,8 tahun	$\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$ $= \frac{71,8}{71,32} \times 100\% = 100,67\%$
7. PDRB sektor pertanian	Juta rupiah	Perhitungan PDRB dilaksanakan oleh BPS dan rilis tahun 2024. Dalam perhitungan termasuk kehutanan dan penebangan kayu namun tidak termasuk perkebunan dan perikanan. PDRB sektor pertanian tahun 2024 = 631.700,37 juta rupiah	$\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$ $= \frac{631.700,37}{672.597,9} \times 100\% = 93,92\%$

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Penjelasan Perhitungan/Perolehan Data Realisasi	Perhitungan Capaian (%)
8. PDRB sektor perikanan	Juta rupiah	Perhitungan PDRB dilaksanakan oleh BPS dan rilis tahun 2024. PDRB sektor perikanan tahun 2024 = 197.131,52 juta rupiah	$\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$ $= \frac{197.131,52}{191.262,8} \times 100\% = 103,07\%$
9. PDRB sektor perkebunan	Juta rupiah	Perhitungan PDRB dilaksanakan oleh BPS dan rilis tahun 2024. PDRB sektor perkebunan tahun 2024 = 659.116,09 juta rupiah	$\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$ $= \frac{659.116,09}{397.068,6} \times 100\% = 166\%$
10. PDRB sektor koperasi dan usaha kecil menengah	Juta rupiah	Perhitungan PDRB dilaksanakan oleh BPS dan rilis tahun 2024. Dalam perhitungan termasuk jasa perantara keuangan. PDRB sektor koperasi dan usaha kecil menengah tahun 2024 = 177.560,14 juta rupiah	$\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$ $= \frac{177.560,14}{160.676,1} \times 100\% = 110,51\%$
11. PDRB sektor perdagangan	Juta rupiah	Perhitungan PDRB dilaksanakan oleh BPS dan rilis tahun 2024. Dalam perhitungan meliputi perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. PDRB sektor perdagangan tahun 2024 = 915.275,67 juta rupiah	$\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$ $= \frac{915.275,67}{750.936,7} \times 100\% = 121,88\%$

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Penjelasan Perhitungan/Perolehan Data Realisasi	Perhitungan Capaian (%)
12. PDRB sektor industri	Juta rupiah	Perhitungan PDRB dilaksanakan oleh BPS dan rilis tahun 2024. Dalam perhitungan meliputi industri pengolahan. PDRB sektor industri tahun 2024 = 1.195.895,94 juta rupiah	$\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$ $= \frac{1.195.895,94}{986.408,6} \times 100\% = 121,24\%$
13. Persentase kunjungan wisata	%	$\frac{Jumlah\ realisasi\ kunjungan\ wisata}{Jumlah\ kunjungan\ wisata\ yang\ direncanakan} \times 100\%$ $= \frac{88.678}{110.000} \times 100\% = 80,62\%$	$\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$ $= \frac{80,62}{80} \times 100\% = 100,77\%$
14. Angka Pengangguran Terbuka	%	Perhitungan Angka Pengangguran Terbuka dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik. Data BPS Tahun 2024 = 4,71%	$\frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$ $= \frac{3,43 - (4,71 - 3,43)}{3,43} \times 100\% = 62,68\%$
15. Pengeluaran perkapita pertahun	Ribu/orang/tahun	Perhitungan Pengeluaran perkapita dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik. Data BPS Tahun 2024 = 11.150	$\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$ $= \frac{11.150}{9.993} \times 100\% = 111,58\%$
16. Persentase PMKS yang mandiri	%	$\frac{Jumlah\ PMKS\ yang\ mandiri}{Jumlah\ PMKS\ yang\ ditangani} \times 100\%$ $= \frac{2.394}{9.553} \times 100\% = 25,06\%$	$\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$ $= \frac{25,06}{22,05} \times 100\% = 113,65\%$

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Penjelasan Perhitungan/Perolehan Data Realisasi	Perhitungan Capaian (%)
17. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)	%	$\frac{\text{Jumlah pelanggaran K3 yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pelanggaran K3 yang terjadi}} \times 100\%$ $= \frac{300 \text{ pelanggaran}}{300 \text{ pelanggaran}} \times 100\% = 100\%$	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$ $= \frac{100}{87,5} \times 100\% = 114,29\%$
18. Persentase kasus konflik yang tertangani	%	$\frac{\text{Jumlah konflik sosial yang tertangani}}{\text{Jumlah kasus konflik sosial}} \times 100\%$ $= \frac{17 \text{ kasus}}{17 \text{ kasus}} \times 100\% = 100\%$	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$ $= \frac{100}{80} \times 100\% = 125\%$
19. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	nilai	Data DLH 2022: Indeks Kualitas Air (IKA) = 51,95 Indeks Kualitas Udara (IKU) = 94,36 Indeks Kualitas Lahan (IKL) = 83,01 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) : $(0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL})$ $= (0,376 \times 51,95) + (0,405 \times 94,36) + (0,219 \times 83,01) = 75,59$	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$ $= \frac{75,59}{73,64} \times 100\% = 102,65\%$
20. Angka Prevalensi Stunting	%	Data Balitbang Kemenkes RI, Hasil SSGI dan SKI terakhir untuk Kabupaten Barito Utara. Angka Prevalensi Stunting = 15,3%	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$ $= \frac{15,3}{16,21} \times 100\% = 105,61\%$

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Penjelasan Perhitungan/Perolehan Data Realisasi	Perhitungan Capaian (%)
21. Persentase penduduk miskin	%	Perhitungan persentase penduduk miskin dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik. Data Juli 2024 = 5,67%	$\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$ $\frac{5,67}{5,08} \times 100\% = 88,39\%$
22. Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori (Nilai)	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kabupaten Barito Utara sesuai Hasil evaluasi RB pada portal RB Nasional Hasil Evaluasi tahun 2024 = B (69,07)	$\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$ $= \frac{B (69,07)}{B (60,01)} \times 100\% = 115,10\%$
23. Nilai SAKIP	Predikat (Nilai)	Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Barito Utara sesuai Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Nomor B/390/AA.05/2024 Tanggal 3 September 2024 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024. Hasil Evaluasi Tahun 2023 = 63,74 (B)	$\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$ $= \frac{B (63,74)}{B (65)} \times 100\% = 98,06\%$

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Penjelasan Perhitungan/Perolehan Data Realisasi	Perhitungan Capaian (%)
24. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat (Nilai)	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan mengacu kepada Peraturan MenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Hasil SKM tahun 2024, indeks kepuasan masyarakat B (86,36)	$\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$ $= \frac{B (86,36)}{B (77,00)} \times 100\% = 112,16\%$
25. Opini BPK	Predikat (Opini ke-)	Penilaian opini yang di keluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan daerah. Hasil evaluasi 2023 terhadap laporan keuangan tahun 2022 memperoleh opini WTP (1)	$\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$ $= \frac{WTP (1)}{WTP (1)} \times 100\% = 100\%$

3.1.4 Capaian Sasaran Strategis Tahun 2024

Persentase Pencapaian sasaran strategis merupakan rata-rata persentase pencapaian indikator kinerja utama (IKU) untuk masing-masing sasaran tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 9.
Capaian Sasaran Strategis Tahun 2024

No.	Sasaran	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah	108,42	Baik Sekali
2	Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung listrik	92,85	Baik
3	Menurunnya desa/ kelurahan blankspot	100,00	Baik
4	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	101,33	Baik Sekali
5	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	100,67	Baik Sekali
6	Meningkatnya sektor pertanian	93,92	Baik
7	Meningkatnya sektor perikanan	103,07	Baik Sekali
8	Meningkatnya sektor perkebunan	166,00	Baik Sekali
9	Meningkatnya sektor koperasi dan UKM	110,51	Baik Sekali
10	Meningkatnya sektor perdagangan	121,88	Baik Sekali
11	Meningkatnya sektor industri	121,24	Baik Sekali
12	Meningkatnya daya saing pariwisata	100,77	Baik Sekali
13	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	62,68	cukup
14	Meningkatnya daya beli masyarakat	111,58	Baik Sekali

No.	Sasaran	Capaian (%)	Kategori
15	Meningkatnya penanganan masalah Kesejahteraan Sosial	113,65	Baik Sekali
16	Meningkatnya ketertiban masyarakat	114,29	Baik Sekali
17	Meningkatnya penanganan konflik	125,00	Baik Sekali
18	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	102,65	Baik Sekali
19	Menurunnya stunting	105,61	Baik Sekali
20	Menurunnya kemiskinan	88,39	Baik
21	Meningkatnya penerapan Reformasi Birokrasi	115,10	Baik Sekali
22	Meningkatnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	98,06	Baik
23	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	112,16	Baik Sekali
24	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	100,00	Baik
Rata-rata		107,08	Baik Sekali

Capaian kinerja untuk sasaran strategis, dari 24 (dua puluh empat) sasaran strategis, 1 sasaran strategis atau 4,17% dengan kategori Cukup, 6 sasaran atau 25% dengan kategori Baik dan 17 sasaran strategis atau 70,83% dengan kategori capaian Baik Sekali.

Dari 24 Sasaran strategis, 19 Sasaran dapat terealisasi dengan capaian 100% atau lebih dan 5 sasaran strategis dengan capaian di bawah 100%.

2.1.5 Perbandingan realisasi dan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan kinerja tahun 2023 dengan 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 10.
Perbandingan Kinerja Tahun 2023 dan 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1. Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah	Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah	%	92,23	100	108,42	92,23	100	108,42
2. Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung listrik	Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik	%	95,15	82,52	86,73	95,15	88,35	92,85
3. Menurunnya desa/kelurahan blankspot	Persentase desa/kelurahan blankspot	%	0,00	5,83	94,17	0,00	0,00	100
4. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,70	8,91	102,41	8,61	8,92	103,60
	Angka melek huruf	%	99,60	99,36	99,76	99,7	98,77	99,07
5. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,32	73,58	103,17	71,32	71,8	100,67
6. Meningkatnya sektor pertanian	PDRB sektor pertanian	Juta rupiah	668.183,8	598.012,73	89,50	672.597,9	631.700,37	93,92
7. Meningkatnya sektor perikanan	PDRB sektor perikanan	Juta rupiah	186.685,8	197.272,76	105,67	191.262,8	197.131,52	103,07

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
8. Meningkatnya sektor perkebunan	PDRB sektor perkebunan	Juta rupiah	396.640,2	554.158,25	139,71	397.068,6	659.116,09	166,00
9. Meningkatnya sektor koperasi dan UKM	PDRB sektor koperasi dan usaha kecil menengah	Juta rupiah	160.676,1	172.080,93	107,10	160.676,1	177.560,14	110,51
10. Meningkatnya sektor perdagangan	PDRB sektor perdagangan	Juta rupiah	715.607,7	858.152,19	119,92	750.936,7	915.275,67	121,88
11. Meningkatnya sektor industri	PDRB sektor industri	Juta rupiah	935.486,5	1.129.422,38	120,73	986.408,6	1.195.895,94	121,24
12. Meningkatnya daya saing pariwisata	Persentase kunjungan wisata	%	80	116,86	146,08	80	80,62	100,77
13. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Angka pengangguran terbuka	%	4,65	4,82	96,34	3,43	4,71	62,68
14. Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran perkapita pertahun	ribu/orang/tahun	9.825	10.720	106,91	9.993	11.150	111,58
15. Meningkatnya penanganan masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mandiri	%	21,73	25,06	115,32	22,05	25,06	113,65
16. Meningkatnya ketertiban masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)	%	87,5	95	108,57	87,5	100	114,29

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
17. Meningkatnya penanganan konflik	Persentase kasus konflik yang tertangani	%	80	100	125	80	100	125,00
18. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	73,64	75,94	103,12	73,64	75,59	102,65
19. Menurunnya stunting	Angka Prevalensi Stunting	%	16,21	15,3	105,61	16,21	15,3	105,61
20. Menurunnya kemiskinan	Persentase penduduk miskin	%	5,10	5,35	95,10	5,08	5,67	88,39
21. Meningkatnya penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori (nilai)	B (60,01)	B (66,89)	111,46	B (60,01)	B (69,07)	115,10
22. Meningkatnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	Kategori (nilai)	B (65)	B (62,74)	96,52	B (65)	B (63,74)	98,06
23. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat (nilai)	B (77,00)	B (80,73)	104,84	B (77)	B (86,36)	112,16
24. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	Predikat (opini ke-)	WTP (1)	WTP (1)	100	WTP (1)	WTP (1)	100,00

Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2024 sebesar 107,08% atau dalam kategori Baik Sekali. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan kinerja tahun 2023 yaitu 106,34% namun masih dalam kategori yang sama.

2.1.6 Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam RPD 2024-2026

Perbandingan realisasi dan target kinerja yang terdapat dalam RPD Kabupaten Barito Utara 2024-2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 11.
Perbandingan Kinerja Tahun 2024 dengan Target pada RPD 2024-2026

Indikator Kinerja Utama	Satuan	2023 (Target Awal)	2024			2025	2026 (Akhir)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Target
1. Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah	%	92,23	92,23	100	108,42	94,50	97,73
2. Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik	%	95,15	95,15	88,35	92,85	96,83	99,12
3. Persentase desa/kelurahan blankspot	%	0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00
4. Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,70	8,61	8,92	103,60	8,62	8,63
5. Angka melek huruf	%	99,60	99,70	98,77	99,07	100	100
6. Angka Harapan Hidup	Tahun	71,32	71,32	71,8	100,67	71,33	71,34
7. PDRB sektor pertanian	Juta rupiah	668.183,8	672.597,9	631.700,37	93,92	731.789,1	796.189,3
8. PDRB sektor perikanan	Juta rupiah	186.685,8	191.262,8	197.131,52	103,07	202.562,4	214.529,5
9. PDRB sektor perkebunan	Juta rupiah	396.640,2	397.068,6	659.116,09	166,00	406.575,4	416.309,8
10. PDRB sektor koperasi dan usaha kecil menengah	Juta rupiah	160.676,1	160.676,1	177.560,14	110,51	172.726,8	185.681,3
11. PDRB sektor perdagangan	Juta rupiah	715.607,7	750.936,7	915.275,67	121,88	789.585,9	830.224,3
12. PDRB sektor industri	Juta rupiah	935.486,5	986.408,6	1.195.895,94	121,24	1.042.183	1.101.111
13. Persentase kunjungan wisata	%	80	80	80,62	100,77	90	95

Indikator Kinerja Utama	Satuan	2023 (Target Awal)	2024			2025	2026 (Akhir)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Target
14. Angka pengangguran terbuka	%	4,65	3,43	4,71	62,68	3,40	3,37
15. Pengeluaran perkapita pertahun	ribu/orang/ tahun	9.825	9.993	11.150	111,58	10.164	10.339
16. Persentase penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mandiri	%	21,73	22,05	25,06	113,65	22,36	22,67
17. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)	%	87,5	87,5	100	114,29	87,5	87,5
18. Persentase kasus konflik yang tertangani	%	80	80	100	125,00	80	80
19. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	73,64	73,64	75,59	102,65	73,68	73,73
20. Angka Prevalensi Stunting	%	16,21	16,21	15,3	105,61	16	15,8
21. Persentase penduduk miskin	%	5,1	5,08	5,67	88,39	5,07	5,05
22. Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori (nilai)	B (60,01)	B (60,01)	B (69,07)	115,10	B (61)	B (65)
23. Nilai SAKIP	Kategori (nilai)	B (65)	B (65)	B (63,74)	98,06	B (67)	B (69)
24. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat (nilai)	B (77)	B (77)	B (86,36)	112,16	B (78)	B (79)
25. Opini BPK	Predikat (opini ke-)	WTP (1)	WTP (1)	WTP (1)	100,00	WTP (1)	WTP (1)

2.1.7 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan provinsi dan nasional

Beberapa realisasi indikator kinerja Kabupaten Barito Utara yang bisa diperbandingkan dengan angka Provinsi Kalimantan Tengah maupun nasional sesuai data yang tersedia antara lain:

Tabel 12.
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Provinsi dan Nasional

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi Tahun 2024		
		Kabupaten Barito Utara	Provinsi Kalimantan Tengah	Nasional
Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,92	8,81	8,85
Angka Melek Huruf	%	98,77	99,80	99,83
Angka Harapan Hidup	Tahun	71,8	70,43	72,39
Pengeluaran Perkapita	ribu/orang/tahun	11.150	12.303	12.341
Angka Pengangguran Terbuka	%	4,71	4,01	4,91
Angka Prevalensi Stunting	%	15,3	23,5	21,6
Persentase Penduduk Miskin	%	5,67	5,26	8,57
Nilai SAKIP	nilai	63,74	62,55	64,23

2.2. Analisa Capaian Kinerja

2.2.1 Analisis faktor penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja tahun 2024 dan langkah perbaikan/solusi

Analisis penyebab keberhasilan maupun kegagalan dan alternatif solusi perbaikan bagi target yang tidak tercapai sebagai berikut.

Tabel 13.

Analisis faktor penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja tahun 2024 serta langkah perbaikan/solusi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja 2024 (kategori)	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan langkah perbaikan/solusi
1. Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah	Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah	108,42% (Baik Sekali)	<u>Faktor Penyebab keberhasilan:</u> 1) Perencanaan yang matang dalam pembukaan akses darat di beberapa lokasi yang telah ditentukan dimana perencanaan sudah dilaksanakan pada tahun sebelumnya (N-1). 2) Tersedianya anggaran yang cukup untuk mengeksekusi perencanaan yang dibuat. 3) Terpeliharanya kondisi jalan dan jembatan penghubung yang telah ada sebelumnya dalam kondisi baik dan fungsional.
2. Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung listrik	Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik	92,85% (Baik)	<u>Faktor Penyebab belum tercapai 100%:</u> 1) Faktor geografis yang menyulitkan pemasangan tiang jaringan. 2) Kendala pembebasan jalan (row) pembangunan jaringan listrik. <u>Langkah perbaikan/Solusi:</u> 1) Meningkatkan dukungan dan koordinasi dengan PLN dalam rangka penanganan permasalahan pembangunan jaringan listrik berkaitan masalah pembebasan jalan (row) dengan memediasi pertemuan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja 2024 (kategori)	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan langkah perbaikan/solusi
			antara warga beserta dengan perwakilan dari PLN. Telah dibentuk tim terpadu yang melibatkan seluruh stakeholder dalam penanganan permasalahan pembebasan lahan. 2) Berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terutama dalam pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
3. Menurunnya desa/kelurahan <i>blankspot</i>	Persentase desa/kelurahan <i>blankspot</i>	100% (Baik)	<u>Faktor Penyebab Keberhasilan:</u> 1) Berjalannya pembangunan menara BTS baru yang berhasil mengcover beberapa area desa blankspot 2) koordinasi dengan BP3TI Kementerian Komunikasi dan Informatika RI selaku yang berwenang dalam program pemasangan BTS. 3) Komunikasi dan koordinasi dengan provider penyedia layanan GSM dalam perluasan layanan.
4. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah	103,60% (Baik Sekali)	<u>Faktor Penyebab keberhasilan:</u> 1) Meningkatnya kesadaran akan wajib belajar sembilan tahun. 2) Meningkatnya akses pendidikan dasar dan menengah serta semakin terbukanya akses pendidikan tinggi. 3) Berjalannya program dan kegiatan untuk peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dasar.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja 2024 (kategori)	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan langkah perbaikan/solusi
	Angka Melek Huruf	99,07% (Baik)	<u>Faktor Penyebab belum tercapai 100%:</u> 1) Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan. 2) Tingkat gengsi yang masih tinggi sehingga untuk memenuhi pendidikan penyelesaian buta aksara terabaikan. 3) Kurangnya motivasi untuk mengikuti paket A dan B masih sangat rendah, terutama yang berdomisili pada pedalaman atau perkampungan yang jauh selain itu faktor pekerjaan atau mata pencarian seperti pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan. <u>Langkah perbaikan/Solusi:</u> 1) Melaksanakan sosialisasi dan pendekatan intensif kepada kelompok masyarakat tentang pentingnya Pendidikan. 2) Melaksanakan kampanye dan pembudayaan gemar membaca sampai ke tingkat desa. 3) Meningkatkan pembinaan kepada lembaga non formal untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikannya.
5. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	Angka Harapan Hidup	100,67% (Baik Sekali)	<u>Faktor Penyebab keberhasilan:</u> 1) Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam praktik pola hidup sehat seiring dengan gencarnya kampanye Gerakan Kesehatan Masyarakat (GERMAS). 2) Semakin baiknya pemberian layanan pada fasilitas kesehatan yang ditunjukkan dengan baiknya hasil survei kepuasan masyarakat pengguna layanan kesehatan di Barito Utara.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja 2024 (kategori)	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan langkah perbaikan/solusi
			3) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan terutama dengan semakin meningkatnya pembangunan RSUD Muara Teweh serta peningkatan kualitas puskesmas.
6. Meningkatnya sektor pertanian	PDRB sektor pertanian	93,92% (Baik)	<u>Faktor Penyebab belum tercapai 100%:</u> 1) Tingginya intensitas hujan sehingga menyebabkan banjir yang merusak lahan pertanian. 2) Terjadinya serangan hama pada sebagian wilayah yang membuat produksi tidak maksimal. <u>Langkah perbaikan/Solusi:</u> 1) Meningkatkan produksi dan pemasaran hasil pertanian. 2) Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian. 3) Penguatan kelembagaan Petani melalui bimbingan dan sosialisasi mengenai penggunaan varietas unggul, pemberian pupuk sesuai rekomendasi, optimalisasi lahan, dan pengendalian hama penyakit. 4) Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan.
7. Meningkatnya sektor perikanan	PDRB sektor perikanan	103,07% (Baik Sekali)	<u>Faktor Penyebab keberhasilan:</u> 1) Meningkatnya jumlah produksi perikanan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya khususnya pada perikanan budidaya. 2) Optimalnya pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan. 3) Pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha kecil masyarakat (nelayan dan pembudidaya ikan).

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja 2024 (kategori)	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan langkah perbaikan/solusi
			4) Pembinaan terhadap kelompok nelayan di wilayah Kabupaten Barito Utara terlaksana dengan baik. 5) Angka konsumsi ikan masyarakat semakin meningkat yang didorong oleh penganjuran Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan).
8. Meningkatnya sektor perkebunan	PDRB sektor perkebunan	166% (Baik Sekali)	<u>Faktor Penyebab keberhasilan:</u> 1) Produksi perkebunan meningkat dan mampu mencapai target yang ditetapkan terutama untuk komoditas besar seperti sawit, karet dan kakao. 2) Adanya perbaikan harga beberapa komoditas perkebunan unggulan seperti karet dan kakao. 3) Gencarnya sosialisasi dan bimbingan teknis budidaya, pemberian bibit unggul, pemberian pupuk sesuai rekomendasi, cara perawatan dan pemeliharaan tanaman perkebunan, cara panen/penyadapan yang baik dan benar, serta pengendalian hama dan penyakit.
9. Meningkatnya sektor koperasi dan UKM	PDRB sektor koperasi dan usaha kecil menengah	110,51% (Baik Sekali)	<u>Faktor Penyebab keberhasilan:</u> 1) Semakin meningkatnya koperasi yang aktif dan koperasi yang sehat di Kabupaten Barito Utara. 2) Semakin meningkatnya usaha kecil dan menengah yang produktif. 3) Adanya pembinaan yang dilakukan secara bertahap terhadap pelaku UKM dengan meningkatkan jumlah usaha mikro kecil, dan jumlah seluruh UKM yang dibina serta memonitoring ijin usaha mikro kecil bagi para pelaku UKM.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja 2024 (kategori)	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan langkah perbaikan/solusi
			4) Adanya program pengembangan dan pembinaan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah pada kegiatan pengembangan sarana promosi hasil produksi dilakukan dengan mengembangkan usaha para pelaku UKM melalui promosi dengan memanfaatkan media online, sosial media dan lainnya. 5) Meningkatnya akses pembiayaan/permodalan bagi UKM.
10. Meningkatnya sektor perdagangan	PDRB sektor perdagangan	121,88% (Baik Sekali)	<u>Faktor Penyebab keberhasilan:</u> 1) Lancarnya distribusi barang dan jasa melalui peningkatan sarana distribusi perdagangan. 2) Adanya penguatan institusi pasar yang dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan dan renovasi pasar. 3) Semakin meningkatnya aktivitas usaha masyarakat pada sektor perdagangan selama tahun 2023.
11. Meningkatnya sektor industri	PDRB sektor industri	121,24% (Baik Sekali)	<u>Faktor Penyebab keberhasilan:</u> 1) Meningkatnya nilai aset dan nilai produksi industri di Kabupaten Barito Utara. 2) Meningkatnya jumlah perusahaan industri kecil dibandingkan tahun sebelumnya terutama dari jenis industri kerajinan/<i>craft industry</i>. 3) Tumbuhnya industri pengolahan pangan di Kabupaten Barito Utara.
12. Meningkatnya daya saing pariwisata	Persentase kunjungan wisata	100,77% (Baik Sekali)	<u>Faktor Penyebab keberhasilan:</u> 1) Meningkatnya pengelolaan objek wisata terutama objek wisata unggulan di Barito Utara.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja 2024 (kategori)	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan langkah perbaikan/solusi
			2) Meningkatnya promosi wisata yang masif dan efektif melalui media sosial, pelaksanaan pagelaran seni budaya dan atraksi budaya virtual dengan latar belakang objek wisata unggulan. 3) Meningkatnya akses menuju objek wisata dengan pembukaan dan perbaikan akses jalan. Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung pada objek wisata.
13. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Angka pengangguran terbuka	62,68% (Baik)	<u>Faktor Penyebab belum tercapai 100%:</u> 1) Laju pertumbuhan penduduk usia produktif yang siap bersaing mengisi peluang pasar kerja yang cenderung meningkat namun pertumbuhan lapangan kerja baru masih belum memadai dengan kondisi tersebut. 2) Nilai investasi di Kabupaten Barito Utara mengalami peningkatan tetapi masih belum mencapai target yang ditetapkan. <u>Langkah perbaikan/Solusi:</u> 1) Meningkatkan Pelayanan informasi ketenagakerjaan melalui penyebaran informasi tenaga kerja. 2) Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. 3) Meningkatkan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan 4) Meningkatkan iklim investasi dan realisasi Investasi untuk meningkatkan serapan tenaga kerja di Barito Utara melalui promosi, penyederhanaan prosedur dan pemanfaatan teknologi informasi. 5) Peningkatan program untuk menciptakan wirausahawan baru.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja 2024 (kategori)	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan langkah perbaikan/solusi
14. Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran perkapita pertahun	111,58% (Baik sekali)	<u>Faktor Penyebab keberhasilan:</u> 1) Semakin membaiknya kegiatan usaha masyarakat terutama sektor UKM 2) Meningkatnya pembinaan terhadap usaha kecil dan menengah yang produktif. 3) Pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan lembaga ekonomi pedesaan turut menciptakan lapangan pekerjaan di desa sehingga meningkatkan taraf perekonomian masyarakat pedesaan.
15. Meningkatnya penanganan masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mandiri	113,65% (Baik Sekali)	<u>Faktor Penyebab keberhasilan:</u> 1) Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018, tentang standar teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial. 2) Program prioritas daerah berupa program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, fakir miskin, komunitas adat terpencil dan PMKS yang mampu dijalankan dengan baik melalui sinergi beberapa perangkat daerah. 3) Adanya fokus yang dilakukan pemerintah bersama Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) melalui upaya penanganan dan pembinaan khususnya bagi masyarakat yang tergolong miskin agar lebih mandiri dan memiliki usaha sendiri. 4) Adanya dukungan sarana prasarana pelayanan Sosial dan sumber daya manusia penyelenggara pelayanan sosial.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja 2024 (kategori)	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan langkah perbaikan/solusi
16. Meningkatnya ketertiban masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)	114,29% (Baik Sekali)	<u>Faktor Penyebab keberhasilan:</u> 1) Operasi pengendalian terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terlaksana dengan baik. 2) Penanganan pengaduan adanya pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berjalan dengan baik. 3) Patroli rutin dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di seluruh daerah. 4) Sosialisasi peraturan perundang-undangan daerah kepada seluruh masyarakat di daerah berjalan dengan efektif. 5) Penegakan atas pelanggaran pelaksanaan peraturan perundang-undangan daerah.
17. Meningkatnya penanganan konflik	Persentase Penyelesaian Konflik Sosial	125% (Baik Sekali)	<u>Faktor Penyebab keberhasilan:</u> 1) Peran serta Tim Kewaspadaan Dini dan Tim Konflik Sosial yang mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta mengantisipasi berbagai bentuk Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) di daerah. Dalam rangka mendukung tim kewaspadaan dini telah dibentuk Pusat Komunikasi dan Informasi (Puskomin) untuk memberikan laporan secara cepat, tepat dan akurat berbagai kegiatan pemerintah daerah dan laporan tentang kondusivitas wilayah. 2) Adanya forum-forum strategis yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara, antara lain: Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forkopimda dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja 2024 (kategori)	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan langkah perbaikan/solusi
			Keberadaan forum-forum ini berperan penting dalam mengantisipasi setiap permasalahan atau gangguan yang mungkin timbul di tengah masyarakat karena forum ini merupakan wadah informasi, komunikasi, konsultasi dari berbagai unsur terkait dalam rangka mewujudkan sinergitas dan harmonisasi dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang terjadi dan berkembang di wilayah Kabupaten Barito Utara. 3) Terjalannya koordinasi dan konsolidasi antara Pemerintah Kabupaten Barito Utara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda dalam rangka melakukan pencegahan terkait berbagai permasalahan khususnya masalah konflik sosial yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. 4) Tersusunnya Rencana Aksi Terpadu penanganan konflik sosial di kabupaten Barito Utara Tahun 2023.
18. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	102,65% (Baik Sekali)	Faktor Penyebab keberhasilan: 1) Program dan kegiatan dalam rangka pengendalian pencemaran Air dapat berjalan efektif untuk menurunkan pencemaran lingkungan khususnya pencemaran air. Untuk Pengambilan sampel air dilakukan pada 3 Sungai seperti Sungai Lahei, Sungai Teweh dan Sungai Montalat. Untuk pengambilan sampel air dilakukan setiap masing-masing sungai diambil sampel bagian hulu, Bagian Tengah, dan Bagian hilir. 2) Ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk memenuhi ketentuan Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) tetap terlaksana dengan baik.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja 2024 (kategori)	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan langkah perbaikan/solusi
			3) Aktivitas pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah cair dan B3 bertambah selama tahun 2024, akan tetapi para Pelaku Usaha dan/atau kegiatan tetap taat dalam menangani limbah sesuai dengan aturan perizinan yang diberikan. 4) Menurunnya atau berkurangnya kejadian kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan turunnya kualitas udara. 5) Program dan kegiatan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan sudah berjalan maksimal karena ada beberapa kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dalam Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup.
19. Menurunnya stunting	Angka Prevalensi Stunting	105,61% (Baik sekali)	<u>Faktor Penyebab keberhasilan:</u> 1) Berjalannya pendampingan calon pengantin, pendampingan ibu hamil, pendampingan Ibu pasca bersalin, dan pendampingan anak usia 0 sampai dengan 59 bulan. 2) Terlaksananya deteksi dini stunting
20. Menurunnya kemiskinan	Persentase penduduk miskin	88,39% (Baik)	<u>Faktor Penyebab belum tercapai 100%:</u> Terbatasnya infrastruktur jalan dan energi listrik di beberapa desa di wilayah kabupaten barito utara sehingga sangat berdampak terhadap akses pertumbuhan hak-hak dasar seperti kesehatan, pendidikan dan lain-lain. <u>Langkah perbaikan/Solusi:</u> 1) Mengkoordinasikan dan mensinkronkan program-program penanggulangan kemiskinan pemerintah daerah serta

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja 2024 (kategori)	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan langkah perbaikan/solusi
			mengupayakan pengurangan jumlah desa tertinggal di Kabupaten Barito Utara 2) Memperkuat sinergi dengan pihak swasta guna peningkatan kualitas SDM dan mendorong pembangunan di desa-desa terpencil 3) Meningkatkan koordinasi untuk penyelesaian infrastruktur jalan dalam rangka mempermudah akses pendirian jaringan PLN desa
21. Meningkatnya penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	115,10 (Baik Sekali)	Faktor Penyebab keberhasilan: 1) Tersusunnya penyesuaian road map RB Kabupaten Barito Utara 2020-2024 sebagai acuan pelaksanaan RB di daerah. 2) Meningkatnya implementasi ASN BerAKHLAK. 3) Penerapan tata kelola SPBE mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. 4) Adanya perbaikan dalam Kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa. 5) Terjadi peningkatan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. 6) Perbaikan dalam pengelolaan arsip dan pemanfaatan arsip digital. 7) Terjadi perbaikan dalam reformasi hukum. 8) Terlaksananya sebagian besar rencana aksi RB tahun 2023.
22. Meningkatnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	98,06 (Baik)	Faktor Penyebab belum tercapai 100%: 1) Pada dokumen RPD 2024-2026 terutama dalam penentuan kondisi atau sasaran strategis yang masih menggabungkan beberapa isu strategis ke dalam satu sasaran strategis dan juga belum berorientasi pada hasil (<i>outcome</i>). Selain itu terdapat beberapa indikator yang

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja 2024 (kategori)	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan langkah perbaikan/solusi
			belum berorientasi hasil dan belum menggambarkan prmsip SMART (<i>Specific, Measurable, Achieveable, Relevant, and Timebound</i>). 2) Pohon kinerja telah disusun di tingkat Pemda dan seluruh PD, namun pohon kinerja yang disusun belum mernperhatikan prinsip penyusunan dan belum mempertimbangkan logical framework dan <i>Critical Success Factor</i> (CSF) yang relevan. 3) Belum ada kebijakan atau SOP internal yang mengatur mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan. 4) Beberapa dokumen IKU tingkat pemda dan PO telah dilengkapi dengan formulasi perhitungan, namun tidak dilengkapi dengan definisi operasional. 5) Belurn adanya sistem aplikasi untuk melakukan pengumpulan data kinerja, serta pengukuran kinerja organisasi. 6) Pada laporan kinerja PD masih belum mencantumkan informasi tentang analisis program dan kegiatan yang menunjang, serta upaya kedepan dalam meningkatkan dan atau memperbaiki kinerja. 7) Informasi kinerja yang telah dituangkan dalam LPPO maupun LAKIP PD belum dimanfaatkan dengan baik, terutama pada proses penentuan target maupun strategi serta aktivitas dalam perencanaan tahunan untuk mendukung pencapaian kinerja kedepan. 8) LHE akuntabilitas internal seluruh PObelum disampaikan ke dalam E-SAKIP Reviu, sehingga belum terlihat adanya perbaikan terhadap implementasi AKIP tahun lalu.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja 2024 (kategori)	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan langkah perbaikan/solusi
			<u>Langkah perbaikan SAKIP:</u> 1) Menyusun RPJMD 2025-2029 dengan memastikan tujuan dan sasaran strategis telah berorientasi hasil atau berdampak langsung kepada masyarakat (<i>result oriented</i>) dan memastikan kualitas indikator kinerja agar memenuhi kriteria yang SMART. 2) Menyusun kembali penjenjangan kinerja setiap PD dengan sepenuhnya memperhatikan seluruh prinsip penyusunan, dan logical framework serta CSF agar tergambar hubungan kausalitas yang logis antar setiap level kinerja. 3) Menyusun dan menetapkan kebijakan atau SOP internal yang mengatur mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan. 4) Melengkapi dokumen IKU seluruh PD dengan definisi operasional, tidak hanya formulasi perhitungan. Untuk memberikan kejelasan terhadap definisi dari ukuran kinerja yang ditetapkan. 5) Membangun sistem aplikasi sebagai media untuk melakukan pengumpulan data kinerja, dan pengukuran kinerja organisasi melalui penjajakan kerja sama dengan pemda lain. 6) Melengkapi informasi terkait analisis program dan kegiatan, serta upaya kedepan dalam meningkatkan dan atau memperbaiki kinerja pada penyusunan laporan kinerja Perangkat Daerah. 7) Melakukan penyesuaian target, strategi, serta aktivitas yang dituangkan pada dokumen perencanaan 2025 untuk mendukung pencapaian kinerja khususnya kinerja yang memiliki realisasi rendah di tahun 2024.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja 2024 (kategori)	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan langkah perbaikan/solusi
			8) Melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP tahun sebelumnya kepada seluruh PD. Kemudian menyampaikan LHE internal akuntabilitas kinerja internal seluruh PD ke dalam aplikasi E-SAKIP Reviu (ESR).
23. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	112,16 (Baik Sekali)	Faktor Penyebab keberhasilan: 1) Adanya tindak lanjut dari beberapa unit penyelenggara pelayanan publik atas beberapa kelemahan yang dijumpai pada hasil SKM tahun sebelumnya terutama untuk masalah antrian, perbaikan sarana dan prasarana serta penanganan pengaduan. 2) Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan publik. 3) Adanya arahan dan penekanan untuk Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) terutama dalam upaya penyederhanaan prosedur pelayanan. 4) Adanya tindak lanjut terhadap hasil evaluasi Ombudsman terhadap tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Hasil evaluasi tersebut digunakan oleh Bupati Barito Utara untuk memberikan penekanan kepada unit penyelenggara pelayanan publik yang ada agar melakukan pembenahan sehingga minimal bisa masuk dalam zona hijau. 5) Adanya <i>reward</i> terhadap unit kerja yang telah menerapkan standar pelayanan publik dengan baik.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja 2024 (kategori)	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan langkah perbaikan/solusi
24. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	100 (Baik)	<u>Faktor Penyebab keberhasilan:</u> 1) Penyusunan APBD Kabupaten Barito Utara tepat waktu. 2) Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan. 3) Laporan akuntabilitas nilai aset daerah dan laporan keuangan lainnya sebagai pendukung kelengkapan administrasi laporan keuangan pemerintah Kabupaten Barito Utara.

2.2.2 Analisis efisiensi penggunaan sumber daya tahun 2024

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya diperoleh dengan membandingkan antara capaian kinerja dari setiap indikator kinerja utama (IKU) pada masing-masing sasaran strategis dengan capaian realisasi keuangan program pendukung sasaran strategis. Tingkat efisiensi positif (+) menunjukkan ada efisiensi dan sebaliknya inefisiensi jika negatif (-).

Tabel 14.
Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran serta tingkat efisiensi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	(%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 =4/3	6	7	8 =7/6	5 - 8
1. Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah	Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah (%)	92,23	100	108,42	525.399.257.817	239.240.474.500	45,53	62,89
2. Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung listrik	Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik	95,15	88,35	92,85	400.000.000	300.177.385	75,04	17,81
3. Menurunnya desa/ kelurahan blankspot	Persentase desa/kelurahan blankspot	0,00	0,00	100	34.165.653.800	30.685.506.400	89,81	10,19
4. Meningkatnya tingkat	Rata-rata lama sekolah	8,61	8,92	103,60	254.240.497.625	227.855.311.765	89,62	13,98
	Angka melek huruf	99,7	98,77	99,07	400.000.000	321.155.727	80,29	18,78

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	(%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 =4/3	6	7	8 =7/6	5 - 8
pendidikan masyarakat								
5. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	71,32	71,8	100,67	87.968.715.097	64.497.383.136	73,32	27,35
6. Meningkatnya sektor pertanian	PDRB sektor pertanian	672.597,9	631.700,37	93,92	57.812.893.156	49.574.092.628	85,75	8,17
7. Meningkatnya sektor perikanan	PDRB sektor perikanan	191.262,8	197.131,52	103,07	3.140.033.549	3.097.071.570	98,63	4,44
8. Meningkatnya sektor perkebunan	PDRB sektor perkebunan	397.068,6	659.116,09	166,00	2.219.796.160	1.566.674.881	70,58	95,42
9. Meningkatnya sektor koperasi dan UKM	PDRB sektor koperasi dan usaha kecil menengah	160.676,1	177.560,14	110,51	198.740.350	193.949.019	97,59	12,92
10. Meningkatnya sektor perdagangan	PDRB sektor perdagangan	750.936,7	915.275,67	121,88	4.539.558.025	4.194.034.535	92,39	29,50
11. Meningkatnya sektor industri	PDRB sektor industri	986.408,6	1.195.895,94	121,24	1.373.016.600	973.616.623	70,91	50,33

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	(%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 =4/3	6	7	8 =7/6	5 - 8
12. Meningkatnya daya saing pariwisata	Persentase kunjungan wisata	80	80,62	100,77	665.934.250	579.305.477	86,99	13,78
13. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Angka pengangguran terbuka	3,43	4,71	62,68	127.174.000	124.710.731	98,06	-35,38
14. Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran perkapita pertahun	9.993	11.150	111,58	1.800.280.000	1.045.771.305	58,09	53,49
15. Meningkatnya penanganan masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mandiri	22,05	25,06	113,65	2.558.445.741	1.180.110.821	46,13	67,52
16. Meningkatnya ketertiban masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)	87,5	100	114,29	890.069.600	843.065.303	94,72	19,57

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	(%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 =4/3	6	7	8 =7/6	5 - 8
17. Meningkatnya penanganan konflik	Persentase kasus konflik yang tertangani	80	100	125,00	2.778.661.500	1.708.167.905	61,47	63,53
18. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,64	75,59	102,65	12.708.237.700	10.526.709.115	82,83	19,81
19. Menurunnya stunting	Angka Prevalensi Stunting	16,21	15,3	105,61	89.396.436.034	65.817.005.729	73,62	31,99
20. Menurunnya kemiskinan	Persentase penduduk miskin	5,08	5,67	88,39	400.981.797.926	344.305.667.215	85,87	2,52
21. Meningkatnya penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	B (60,01)	B (69,07)	115,10	19.414.243.575	11.004.758.459	56,68	58,41
22. Meningkatnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	B (65)	B (63,74)	98,06	6.679.064.550	5.221.301.156	78,17	19,89

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	(%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 =4/3	6	7	8 =7/6	5 - 8
23. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B (77)	B (86,36)	112,16	1.230.207.950	1.036.669.242	84,27	27,89
24. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	WTP (1)	WTP (1)	100,00	351.698.752.427	258.246.013.013	73,43	26,57

2.2.3 Analisis program penunjang pencapaian target kinerja.

Program penunjang sasaran strategis dan indikator kinerja Kabupaten Barito Utara tahun 2024 pada Rencana Pembangunan Daerah dan diturunkan pada program di tingkat perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 15.

Program penunjang pencapaian target kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Utara

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Program dan Kegiatan pada DPA Perangkat Daerah Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1. Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah	Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	
2. Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung listrik	Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik	Program Perekonomian dan Pembangunan (Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam)	Sekretariat Daerah (Bag. Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam)
3. Menurunnya desa/kelurahan blankspot	Persentase desa/kelurahan <i>blankspot</i>	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
4. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	a. Rata-rata lama sekolah b. Angka melek huruf	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
		Program Pengendalian Bahasa dan Sastra	
5. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	Angka Harapan Hidup	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan	Dinas Kesehatan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Program dan Kegiatan pada DPA Perangkat Daerah Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
6. Meningkatnya sektor pertanian	PDRB sektor pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.	
		Program Penyuluhan Pertanian.	
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
7. Meningkatnya sektor perikanan	PDRB sektor perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil perikanan	
8. Meningkatnya sektor perkebunan	PDRB sektor perkebunan	Program Perizinan Usaha Pertanian.	Dinas Pertanian
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.	
9. Meningkatnya sektor koperasi dan UKM serta industri	PDRB sektor koperasi dan usaha kecil menengah	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Program dan Kegiatan pada DPA Perangkat Daerah Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
10. Meningkatnya sektor perdagangan	PDRB sektor perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	
		Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	
11. Meningkatnya sektor industri	PDRB sektor industri	Program Perencanaan dan Pembangunan industri	
12. Meningkatnya daya saing pariwisata	Persentase kunjungan wisata	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
13. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Angka pengangguran terbuka	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM
14. Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran perkapita pertahun	Program Promosi Penanaman Modal Peyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP
		Program Pelayanan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Program dan Kegiatan pada DPA Perangkat Daerah Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
15. Meningkatnya penanganan masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mandiri	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Rehabilitasi Sosial	
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
		Program Penanganan Bencana	
16. Meningkatnya ketertiban masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)	Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Peningkatan Keamanan dan Lingkungan	
		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	
17. Meningkatnya penanganan konflik	Persentase kasus konflik yang tertangani	Program peningkatan Kewaspadaan Nasional dan peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
18. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Pekerjaan Umum dan PenataaRuang
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	
		Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Program dan Kegiatan pada DPA Perangkat Daerah Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	
		Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
		Program Pengelolaan Persampahan	
19. Menurunnya stunting	Angka Prevalensi Stunting	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan	Dinas Kesehatan
		Program Pembinaan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	
		Program Pemenuhan Hak Anak	
		Program Perlindungan Khusus Anak	
20. Menurunnya kemiskinan	Persentase penduduk miskin	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Kesehatan
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pendidikan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Program dan Kegiatan pada DPA Perangkat Daerah Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM
		Program Penempatan Tenaga Kerja	
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
21. Meningkatnya penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kegiatan Penataan Organisasi)	Sekretariat Daerah
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum)	
		Program Perekonomian dan Pembangunan. (Kegiatan Pengelolaan Barang dan Jasa)	
		Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia
		Program Penyelenggaraan Pengawasan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Program dan Kegiatan pada DPA Perangkat Daerah Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
22. Meningkatnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (subkegiatan Peningkatan Kinerja dan RB)	Sekretariat Daerah
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
23. Meningkatnya kualitas pemberian layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Subkegiatan Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana)	Sekretariat Daerah
		Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pencatatan Sipil	
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
24. Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	

2.3. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran untuk masing-masing program dan kegiatan yang pendukung pencapaian kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 16.
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan dalam Pencapaian Target Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	%	Perangkat Daerah
1.	Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah	Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah	Program Penyelenggaraan Jalan	521.078.266.417	235.805.911.437	45,25	Dinas PUPR
			Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	4.320.991.400	3.434.563.063	79,49	Dishub
2.	Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung listrik	Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik	Program Perekonomian dan Pembangunan (Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam)	400.000.000	300.177.385	75,04	Setda (Bag.ESDA)
3.	Menurunnya desa/ kelurahan blankspot	Persentase desa/kelurahan <i>blankspot</i>	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	7.971.599.800	7.943.448.185	99,65	DiskominfoSandi
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	26.194.054.000	22.742.058.215	86,82	
4.	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	253.475.537.925	227.125.356.378	89,60	Dinas Pendidikan
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	764.959.700	729.955.387	95,42	
		Angka melek huruf	Program Pengendalian Bahasa dan Sastra	400.000.000	321.155.727	80,29	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	%	Perangkat Daerah
5.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan	84.887.066.331	62.022.658.381	73,06	Dinas Kesehatan
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.509.133.366	1.412.953.650	93,63	
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	735.619.000	609.042.455	82,79	
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	836.896.400	452.728.650	54,10	
6.	Meningkatnya sektor pertanian	PDRB sektor pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	8.725.085.675	8.659.808.424	99,25	Dinas Pertanian
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.	1.504.796.885	923.969.753	61,40	
			Program Penyuluhan Pertanian.	989.915.825	518.896.075	52,42	
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	46.593.094.771	39.471.418.376	84,72	Dinas PUPR
7.	Meningkatnya sektor perikanan	PDRB sektor perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	311.315.000	309.564.350	99,44	Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.514.760.824	2.486.587.700	98,88	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	%	Perangkat Daerah
			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	107.519.000	106.587.926	99,13	
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil perikanan	206.438.725	194.331.594	94,14	
8.	Meningkatnya sektor perkebunan	PDRB sektor perkebunan	Program Perizinan Usaha Pertanian.	714.999.275	642.705.128	89,89	Dinas Pertanian
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.	1.504.796.885	923.969.753	61,40	
9.	Meningkatnya sektor koperasi dan UKM	PDRB sektor koperasi dan usaha kecil menengah	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	22.216.000	22.164.800	99,77	Disnakertranskop UKM
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	176.524.350	171.784.219	97,31	
10.	Meningkatnya sektor perdagangan	PDRB sektor perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.250.109.000	1.212.824.450	97,02	Disdgrin
			Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	2.102.049.000	1.897.898.378	90,29	
			Program Pengembangan Ekspor	792.240.250	718.960.004	90,75	
			Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	395.159.775	364.351.703	92,20	
11.	Meningkatnya sektor industri	PDRB sektor industri	Program Perencanaan dan Pembangunan industri	1.373.016.600	973.616.623	70,91	Disdgrin

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	%	Perangkat Daerah
12.	Meningkatnya daya saing pariwisata	Persentase kunjungan wisata	Program Pemasaran Pariwisata	665.934.250	579.305.477	86,99	Disbudparpora
13.	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Angka pengangguran terbuka	Program Penempatan Tenaga Kerja	127.174.000	124.710.731	98,06	Disnakertranskop UKM
14.	Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran perkapita pertahun	Program Promosi Penanaman Modal Peyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000	301.744.386	60,35	DPMPTSP
			Program Pelayanan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	700.000.000	485.331.559	69,33	
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	400.280.000	167.865.000	41,94	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	%	Perangkat Daerah
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	90.830.360	45,42	
15.	Meningkatnya penanganan masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mandiri	Program Pemberdayaan Sosial	405.000.000	240.521.049	59,39	Dinas Sosial PMD
			Program Rehabilitasi Sosial	1.190.171.600	464.043.038	38,99	
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	309.692.400	214.992.744	69,42	
			Program Penanganan Bencana	653.581.741	260.553.990	39,87	
16.	Meningkatnya ketertiban masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)	Program Peningkatan Keamanan dan Lingkungan	615.069.600	578.030.903	93,98	Satpol PP
			Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	275.000.000	265.034.400	96,38	
17.	Meningkatnya penanganan konflik	Persentase kasus konflik yang tertangani	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	2.778.661.500	1.708.167.905	61,47	Bakesbangpol
18	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1.800.000.000	1.195.705.895	66,43	DLH
			Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	732.547.700	700.134.461	95,58	
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	67.040.000	66.966.000	99,89	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	%	Perangkat Daerah
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	15.000.000	10.721.000	71,47	
			Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	50.000.000	49.825.500	99,65	
			Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	215.000.000	168.749.190	78,49	
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	10.000.000	9.893.300	98,93	
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	20.000.000	18.573.243	92,87	
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	70.000.000	69.994.800	99,99	
			Program Pengelolaan Persampahan	9.728.650.000	8.236.145.726	84,66	
19.	Menurunnya stunting	Angka Prevalensi Stunting	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan	84.887.066.331	62.022.658.381	73,06	Dinas Kesehatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	%	Perangkat Daerah
			Program Pembinaan Keluarga Berencana	2.444.329.094	1.723.435.691	70,51	Disdalduk KB PPPA
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	1.456.628.109	1.621.085.007	111,29	
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	188.412.500	163.840.799	86,96	
			Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	80.000.000	45.009.550	56,26	
			Program Pemenuhan Hak Anak	79.137.600	60.497.700	76,45	
			Program Perlindungan Khusus Anak	260.862.400	180.478.601	69,19	
20.	Menurunnya kemiskinan	Persentase penduduk miskin	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	309.692.400	214.992.744	69,42	Dinas Sosial PMD
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan	84.887.066.331	62.022.658.381	73,06	Dinas Kesehatan
			Program Pengelolaan Pendidikan	253.475.537.925	227.125.356.378	89,60	Dinas Pendidikan
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.674.182.375	1.667.970.977	99,63	Dinas Perkimtan
			Program Kawasan Permukiman	2.165.148.275	2.028.650.135	93,70	
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	22.216.000	22.164.800	99,77	Disnakertranskop UKM
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	176.524.350	171.784.219	97,31	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	%	Perangkat Daerah
			Program Penempatan Tenaga Kerja	127.174.000	124.710.731	98,06	DKPP
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	311.315.000	309.564.350	99,44	
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.514.760.824	2.486.587.700	98,88	
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	8.725.085.675	8.659.808.424	99,25	Dinas Pertanian
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	46.593.094.771	39.471.418.376	84,72	Dinas PUPR
21.	Meningkatnya penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kegiatan Penataan Organisasi)	1.497.000.000	1.131.520.487	75,59	Setda (Bag. Organisasi)
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum)	2.003.313.500	1.058.173.114	52,82	Setda (Bag. Hukum)
			Program Perekonomian dan Pembangunan (Kegiatan Pengelolaan Barang dan Jasa)	1.205.400.625	1.018.138.231	84,46	Setda (Bag. PBJ)
			Program Kepegawaian Daerah	11.230.544.450	4.445.159.306	39,58	BKPSDM
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.657.505.000	2.629.635.190	98,95	Inspektorat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	%	Perangkat Daerah
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	820.480.000	722.132.131	88,01	
22.	Meningkatnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.544.845.175	1.697.391.531	66,70	Bappedalitbang
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	896.714.375	560.573.244	62,51	
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.657.505.000	2.629.635.190	98,95	Inspektorat
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (subkegiatan Peningkatan Kinerja dan RB)	580.000.000	333.701.191	57,53	Setda (Bag.Organisasi)
23.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Subkegiatan Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana)	407.000.000	362.955.095	89,18	Setda (Bag.Organisasi)
			Program Pendaftaran Penduduk	304.113.250	294.578.550	96,86	Disdukcapil
			Program Pencatatan Sipil	106.313.800	93.125.033	87,59	
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	185.280.900	167.680.204	90,50	
			Program Pengelolaan Profil Kependudukan	27.500.000	27.500.000	100,00	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	%	Perangkat Daerah
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	90.830.360	45,42	DPMPTSP
24.	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	347.909.346.427	254.754.344.229	73,22	BPKA
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.131.901.000	862.033.594	76,16	
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.657.505.000	2.629.635.190	98,95	Inspektorat

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 107,08% (predikat Baik Sekali) mengalami peningkatan dibandingkan kinerja tahun 2023 yaitu 106,34%. Hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Barito Utara tahun 2024, yaitu 17 indikator atau 25% bermakna Baik Sekali, 7 indikator atau 28% bermakna Baik dan 1 atau 4% bermakna Cukup.

Dari 25 Indikator Kinerja Utama (IKU), 19 indikator mampu memenuhi/melampaui target 100% dan 6 indikator belum memenuhi target (di bawah 100%). Adapun IKU yang mampu memenuhi target dengan capaian kinerja 100% atau lebih antara lain: Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah

1. Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah
2. Persentase desa/kelurahan blankspot
3. Rata-rata lama sekolah
4. Angka Harapan Hidup
5. PDRB sektor perikanan
6. PDRB sektor perkebunan
7. PDRB sektor koperasi dan usaha kecil menengah
8. PDRB sektor perdagangan
9. PDRB sektor industri
10. Persentase kunjungan wisata
11. Pengeluaran perkapita pertahun
12. Persentase penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mandiri
13. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)
14. Persentase kasus konflik yang tertangani
15. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
16. Angka Prevalensi Stunting

17. Indeks Reformasi Birokrasi
18. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
19. Opini BPK

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang belum mampu mencapai target 100% antara lain:

1. Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik
2. Angka Melek Huruf
3. PDRB sektor pertanian
4. Angka Pengangguran Terbuka
5. Persentase penduduk miskin
6. Nilai SAKIP

4.1 Rencana Tindak Lanjut

4.1.1 Tindak Lanjut untuk IKU yang Belum Memenuhi Target

Rencana tindak lanjut dari Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk meningkatkan kinerja pencapaian indikator yang masih belum memenuhi target 100% tahun 2022 antara lain:

1. Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik

- a. Meningkatkan dukungan dan koordinasi dengan PLN dalam rangka penanganan permasalahan pembangunan jaringan listrik berkaitan masalah pembebasan jalan (*row*) dengan memediasi pertemuan antara warga beserta dengan perwakilan dari PLN. Telah dibentuk tim terpadu yang melibatkan seluruh stakeholder dalam penanganan permasalahan pembebasan lahan.
- b. Berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terutama dalam pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

2. Angka Melek Huruf

- a. Melaksanakan sosialisasi dan pendekatan intensif kepada kelompok masyarakat tentang pentingnya pendidikan.
- b. Melaksanakan kampanye dan pembudayaan gemar membaca sampai ke tingkat desa.
- c. Meningkatkan pembinaan kepada lembaga non formal untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikannya.

3. PDRB sektor pertanian

- a. Meningkatkan produksi dan pemasaran hasil pertanian.
- b. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian.
- c. Penguatan kelembagaan Petani melalui bimbingan dan sosialisasi mengenai penggunaan varietas unggul, pemberian pupuk sesuai rekomendasi, optimalisasi lahan, dan pengendalian hama penyakit.
- d. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan.

4. Angka pengangguran terbuka

- a. Meningkatkan Pelayanan informasi ketenagakerjaan melalui penyebarluasan informasi tenaga kerja.
- b. Pelaksanaan program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.
- c. Peningkatan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan
- d. peningkatan iklim investasi dan realisasi Investasi untuk meningkatkan serapan tenaga kerja di Barito Utara melalui promosi, penyederhanaan prosedur dan pemanfaatan teknologi informasi.
- e. Peningkatan program untuk menciptakan wirausahawan baru.

5. Persentase penduduk miskin

- a. Mengoordinasikan dan mensinkronkan program-program penanggulangan kemiskinan pemerintah daerah serta mengupayakan pengurangan jumlah desa tertinggal di Kabupaten Barito Utara
- b. Memperkuat sinergi dengan pihak swasta guna peningkatan kualitas SDM dan mendorong pembangunan di desa-desa terpencil

- c. Meningkatkan koordinasi untuk penyelesaian infrastruktur jalan dalam rangka mempermudah akses pendirian jaringan PLN desa.

6. Nilai SAKIP

- a. Menyusun RPJMD 2025-2029 dengan memastikan tujuan dan sasaran strategis telah berorientasi hasil atau berdampak langsung kepada masyarakat (*result oriented*) dan memastikan kualitas indikator kinerja agar memenuhi kriteria yang SMART.
- b. Menyusun kembali penjenjangan kinerja setiap PD dengan sepenuhnya memperhatikan seluruh prinsip penyusunan, dan logical framework serta CSF agar tergambar hubungan kausalitas yang logis antar setiap level kinerja.
- c. Menyusun dan menetapkan kebijakan atau SOP internal yang mengatur mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.
- d. Melengkapi dokumen IKU seluruh PD dengan definisi operasional, tidak hanya formulasi perhitungan. Untuk memberikan kejelasan terhadap definisi dari ukuran kinerja yang ditetapkan.
- e. Membangun sistem aplikasi sebagai media untuk melakukan pengumpulan data kinerja, dan pengukuran kinerja organisasi melalui penjajakan kerja sama dengan pemda lain.
- f. Melengkapi informasi terkait analisis program dan kegiatan, serta upaya kedepan dalam meningkatkan dan atau memperbaiki kinerja pada penyusunan laporan kinerja Perangkat Daerah.
- g. Melakukan penyesuaian target, strategi, serta aktivitas yang dituangkan pada dokumen perencanaan 2025 untuk mendukung pencapaian kinerja khususnya kinerja yang memiliki realisasi rendah di tahun 2024.
- h. Melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP tahun sebelumnya kepada seluruh PD. Kemudian menyampaikan LHE internal akuntabilitas kinerja internal seluruh PD ke dalam aplikasi E-SAKIP Reviu (ESR).



LAMPIRAN



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 188.45/ 60 /2025

TENTANG

PENYESUAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024-2026

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/98/2024;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi Indikator Kinerja Utama yang lebih berorientasi hasil (*outcome*) dan memenuhi prinsip *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Timebound* (SMART) maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Utara tentang Penyesuaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 10 Januari 2025

Pj. BUPATI BARITO UTARA,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya
2. Inspektur Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh
3. Masing-masing Unit Kerja Penanggung Jawab untuk diketahui dan dilaksanakan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 188.45/ 60 /2025
TENTANG
PENYESUAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN
2024-2026

PENYESUAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024-2026

Rumusan pada RPD 2024-2026 (sebelum penyesuaian)			Penyesuaian	Sesudah penyesuaian	
No.	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah	Rumusan sasaran diubah, indikator tetap	Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah	Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah
2	Meningkatnya Infrastruktur perdesaan dan pengembangan jaringan listrik kelistrikan serta energi lainnya	Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik	Rumusan sasaran diubah, indikator tetap	Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung listrik	Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik
3	Berkembangnya jaringan telekomunikasi dan informasi	Persentase desa/kelurahan blankspot	Rumusan sasaran diubah, indikator tetap	Menurunnya desa/kelurahan <i>blankspot</i>	Persentase desa/kelurahan <i>blankspot</i>
4	Meningkatnya minat wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Rata-rata lama sekolah	Rumusan sasaran diubah, indikator tetap	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah
		Angka melek huruf			Angka melek huruf
5	Meningkatnya fasilitas pendidikan dan tenaga pendidik	Rasio tenaga pendidik terhadap murid	Dikeluarkan dari IKU Kabupaten dan dijadikan IKU pada tingkat Dinas		
6	Meningkatnya fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, manajemen dan	Angka Harapan Hidup	Rumusan sasaran diubah, indikator tetap	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup

Rumusan pada RPD 2024-2026 (sebelum penyesuaian)			Penyesuaian	Sesudah penyesuaian	
No.	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
	pelayanan bidang kesehatan				
7.	Meningkatnya produksi, penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana serta pemasaran hasil pertanian	PDRB sektor pertanian	Rumusan sasaran diubah, indikator tetap	Meningkatnya sektor pertanian	PDRB sektor pertanian
8.	Meningkatnya produksi, penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana serta pemasaran hasil perikanan	PDRB sektor perikanan	Rumusan sasaran diubah, indikator tetap	Meningkatnya sektor perikanan	PDRB sektor perikanan
9.	Meningkatnya produksi, penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana serta pemasaran hasil perkebunan	PDRB sektor perkebunan	Rumusan sasaran diubah, indikator tetap	Meningkatnya sektor perkebunan	PDRB sektor perkebunan
10.	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi, UKM dan peningkatan/ pengembangan perdagangan dan industri	PDRB sektor koperasi dan usaha kecil menengah	Rumusan sasaran diubah dan dipecah menjadi 3, indikator tetap	Meningkatnya sektor koperasi dan UKM	PDRB sektor koperasi dan usaha kecil menengah
		PDRB sektor perdagangan		Meningkatnya sektor perdagangan	PDRB sektor perdagangan
		PDRB sektor industri		Meningkatnya sektor industri	PDRB sektor industri
11.	Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Angka pengangguran terbuka	Dihilangkan dan disinergikan dengan sasaran 13		
		Pendapatan Perkapita Penduduk			
12.	Berkembangnya pemasaran pariwisata, destinasi pariwisata dan kemitraan	Kunjungan wisata	Rumusan sasaran diubah, indikator disempurnakan	Meningkatnya daya saing pariwisata	Persentase kunjungan wisata

Rumusan pada RPD 2024-2026 (sebelum penyesuaian)			Penyesuaian	Sesudah penyesuaian	
No.	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
13.	Meningkatnya kesempatan kerja dan penciptaan iklim usaha yang kondusif	Angka pengangguran terbuka	Rumusan sasaran diubah, indikator tetap	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Angka pengangguran terbuka
		Pengeluaran perkapita pertahun	Rumusan sasaran ditambahkan, indikator tetap	Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran perkapita pertahun
14.	Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mandiri	Rumusan sasaran diubah, indikator tetap	Meningkatnya penanganan masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mandiri
15.	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan serta penanganan konflik dan pengembangan wawasan kebangsaan dan politik	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)	Rumusan sasaran diubah dan dipecah menjadi 2, indikator tetap	Meningkatnya ketertiban masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)
		Persentase kasus konflik yang tertangani		Meningkatnya penanganan konflik	Persentase kasus konflik yang tertangani
16.	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam serta pengendalian pencemaran/perusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Tanah	Rumusan sasaran diubah; indikator disederhanakan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
17.	Menurunnya Angka Stunting	Persentase menurunnya angka stunting	Rumusan sasaran dan indikator disempurnakan	Menurunnya stunting	Angka Prevalensi Stunting

Rumusan pada RPD 2024-2026 (sebelum penyesuaian)			Penyesuaian	Sesudah penyesuaian	
No.	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
18.	Menurunnya angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim	Persentase menurunnya kemiskinan dan kemiskinan ekstrim	Rumusan sasaran dan indikator diubah	Menurunnya kemiskinan	Persentase penduduk miskin
19.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan	Indeks Reformasi Birokrasi	Rumusan sasaran diubah; indikator tetap	Meningkatnya penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi
20.	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	Rumusan sasaran diubah; indikator tetap	Meningkatnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP
21.	Meningkatnya Pengelolaan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Rumusan sasaran diubah; indikator tetap	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
22.	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah berbasis elektronik	Opini BPK	Rumusan sasaran diubah; indikator tetap	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK
23.	Pengembangan produksi dan hilirisasi komoditas unggulan daerah	PDRB sektor pertanian	Tidak dimasukkan, disinergikan dengan sasaran 7, 8 dan 9	-	-
		PDRB sektor perikanan			
		PDRB sektor perkebunan			
24.	Pengembangan akses infrastruktur menuju Ibu Kota Nusantara (IKN)	Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah	Tidak dimasukkan, disinergikan dengan sasaran 1	-	-
25.	Pengembangan Industri dan Perdagangan mendukung Ibu Kota Nusantara (IKN)	PDRB sektor koperasi dan usaha kecil menengah	Tidak dimasukkan, disinergikan dengan sasaran 10	-	-
		PDRB sektor perdagangan			
		PDRB sektor industri			

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 188.45/ 60 /2025
TENTANG
PENYESUAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN
2024-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024-2026 HASIL PENYESUAIAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Penjelasan/formula perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab Data
1	Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah	Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah	Indikator menggambarkan keterhubungan antara desa/kelurahan ke ibu kota kecamatan melalui akses jalan darat. Persentase merupakan perbandingan jumlah desa/kelurahan yang terhubung terhadap jumlah total desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Barito Utara	$\frac{\text{jumlah desa/ kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah}}{\text{Jumlah desa/kelurahan}} \times 100\%$	Data Bina Marga	Dinas PUPR
2.	Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung listrik	Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik	Indikator menggambarkan keterhubungan desa/kelurahan di seluruh wilayah Kab. Barito Utara dengan jaringan listrik PLN. Persentase merupakan perbandingan jumlah desa/kelurahan yang terhubung jaringan listrik terhadap jumlah total desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Barito Utara	$\frac{\text{jumlah desa/ kelurahan yang terhubung jaringan listrik}}{\text{Jumlah desa/kelurahan}} \times 100\%$	Data jaringan PLN	Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA Setda
3.	Menurunnya desa/ kelurahan blankspot	Persentase desa/kelurahan <i>blankspot</i>	Indikator menggambarkan kekosongan jaringan telekomunikasi GSM pada desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Barito Utara	$\frac{\text{jumlah desa/ kelurahan blankspot}}{\text{Jumlah desa/kelurahan}} \times 100\%$	Data jaringan komunikasi	Diskominfo-sandi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Penjelasan/formula perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab Data
			Desa/kelurahan <i>blankspot</i> meruakan desa/kelurahan yang masih belum tersedia jaringan signal GSM.			
4.	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah	Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan masyarakat. Rata-rata Lama Sekolah adalah Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani.	$\left(\frac{\text{Jumlah tahun belajar penduduk usia } \geq 15\text{th yg diselesaikan}}{\text{Jumlah penduduk usia } \geq 15\text{th}} \right) \times 100\%$	Publikasi BPS	Dinas Pendidikan
		Angka melek huruf	Salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat pendidikan suatu wilayah. Angka melek huruf adalah perbandingan jumlah penduduk berumur ≥ 15 tahun yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dengan huruf latin dan atau huruf lainnya, terhadap jumlah penduduk umur ≥ 15 tahun.	$\frac{\text{Jumlah penduduk } \geq 15\text{thn yang melek huruf}}{\text{Jumlah penduduk } \geq 15\text{thn}} \times 100\%$	Publikasi BPS	Dinas Pendidikan
5.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Indikator menggambarkan derajat kesehatan masyarakat. Angka Harapan Hidup merupakan perkiraan rata-rata tahun hidup yang dapat dicapai seseorang sejak lahir	AHH dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program Micro Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA) atau Mortpack dengan data yang bersumber dari Sensus Penduduk Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) sebagai proxy/pendekatan.	Publikasi BPS	Dinas Kesehatan
6.	Meningkatnya sektor pertanian	PDRB sektor pertanian	PDRB sektor pertanian adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor pertanian dalam periode tertentu.	Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Sektor Pertanian sesuai pedoman BPS	Publikasi BPS	Dinas Pertanian

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Penjelasan/formula perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab Data
7.	Meningkatnya sektor perikanan	PDRB sektor perikanan	PDRB sektor pertanian adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perikanan dalam periode tertentu.	Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Sektor Perikanan sesuai pedoman BPS	Publikasi BPS	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
8.	Meningkatnya sektor perkebunan	PDRB sektor perkebunan	PDRB sektor pertanian adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perkebunan dalam periode tertentu.	Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Sektor Perkebunan sesuai pedoman BPS	Publikasi BPS	Dinas Pertanian
9.	Meningkatnya sektor koperasi dan UKM	PDRB sektor koperasi dan usaha kecil menengah	PDRB sektor pertanian adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor koperasi dan usaha kecil menengah dalam periode tertentu.	Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai pedoman BPS	Publikasi BPS	Disnakertrans Kop-UKM
10.	Meningkatnya sektor perdagangan	PDRB sektor perdagangan	PDRB sektor pertanian adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perdagangan dalam periode tertentu.	Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Sektor Perdagangan sesuai pedoman BPS	Publikasi BPS	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
11.	Meningkatnya sektor industri	PDRB sektor industri	PDRB sektor pertanian adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor industri dalam periode tertentu.	Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Sektor Industri sesuai pedoman BPS	Publikasi BPS	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
12.	Meningkatnya daya saing pariwisata	Persentase kunjungan wisata	Indikator uang menunjukkan banyaknya orang yang berkunjung ke wisata di wilayah Kabupaten Barito Utara. Persentase kunjungan wisata adalah perbandingan antara jumlah realisasi kunjungan wisata dengan jumlah yang ditargetkan	$\left(\frac{\text{Jumlah realisasi kunjungan wisata}}{\text{Jumlah kunjungan wisata yang ditargetkan}} \right) \times 100\%$	Data kunjungan wisata	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
13.	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Angka pengangguran terbuka	Indikator yang menggambarkan seberapa banyak angkatan kerja yang tidak terserap di pasar kerja. Angka Pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja	$\left(\frac{\text{Jumlah Pengangguran terbuka usia Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja}} \right) \times 100\%$	Publikasi BPS	Disnakertrans Kop-UKM

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Penjelasan/formula perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab Data
14.	Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran perkapita pertahun	Pengeluaran per kapita per tahun adalah biaya yang dikeluarkan oleh seluruh anggota rumah tangga untuk konsumsi selama setahun dibagi dengan jumlah anggota rumah tangga	Biaya yang dikeluarkan oleh seluruh anggota rumah tangga untuk konsumsi selama setahun dibagi dengan jumlah anggota rumah tangga	Publikasi BPS	Disnakertrans Kop-UKM
15.	Meningkatnya penanganan masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mandiri	Persentase penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mandiri adalah jumlah PMKS yang mandiri dibagi dengan jumlah total PMKS yang ada di wilayah Kabupaten Barito Utara. PMKS Mandiri merupakan penerima manfaat Program Pemberdayaan Sosial yang meningkat kesejahteraannya, mampu memenuhi kebutuhan dasar sehingga sudah memenuhi kriteria mandiri dan tidak memperoleh bantuan lagi.	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang Mandiri}}{\text{Jumlah Total PMKS}} \times 100\%$	Data Kesejahteraan sosial	Dinas Sosial-PMD
16.	Meningkatnya ketertiban masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)	Indikator yang menggambarkan tingkat penyelesaian terhadap kasus pelanggaran yang dilakukan warga menyangkut ketertiban, ketenteraman dan keindahan	$\frac{\text{Jumlah pelanggaran K3 yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pelanggaran K3 yang terjadi}} \times 100\%$	Data pelanggaran K3	Satuan Polisi Pamong Praja
17.	Meningkatnya penanganan konflik	Persentase kasus konflik yang tertangani	Indikator yang menggambarkan penanganan terhadap kasus konflik sosial yang terjadi di wilayah Kabupaten Barito Utara. Konflik sosial yang terjadi antara lain: konflik sosial antara masyarakat dan perusahaan, konflik tata batas, sosial budaya, dan konflik hukum.	$\frac{\text{Jumlah konflik sosial yang tertangani}}{\text{Jumlah kasus konflik sosial}} \times 100\%$	Data Bidang Kewaspadaan dan Penanganan Konflik	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Penjelasan/formula perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab Data
18.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. IKLH untuk wilayah Kabupaten/Kota merupakan angka komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKA) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL)	$IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$	Data kualitas air, kualitas udara, kualitas lahan	Dinas Lingkungan Hidup
19.	Menurunnya stunting	Angka Prevalensi Stunting	Prevalensi stunting adalah persentase jumlah balita yang mengalami gangguan pertumbuhan fisik dalam suatu populasi. Prevalensi stunting digunakan sebagai indikator untuk menilai masalah gizi pada kelompok balita	Prevalensi stunting diperoleh dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) $Prevalensi = (\text{jumlah stunting pada balita} \div \text{total jumlah balita}) \times 100$	Data hasil SSGI	Dinas KB-P3A
20.	Menurunnya kemiskinan	Persentase penduduk miskin	Persentase penduduk miskin adalah banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan nasional dibagi dengan jumlah penduduk pada periode waktu yang sama dinyatakan dalam satuan persen (%). Garis kemiskinan merupakan representase dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.	Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah penduduk seluruhnya pada periode waktu yang sama dinyatakan dalam satuan persen (%).	Publikasi BPS	Bapperida
21.	Meningkatnya penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indikator komposit yang menggambarkan hasil pelaksanaan RB. Indikator ini digunakan sebagai ukuran keberhasilan pemerintah	Penentuan Indeks Reformasi Birokrasi mengacu pada Peraturan MenPANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.	Hasil Evaluasi RB dari	Tim RB

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Penjelasan/formula perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab Data
			daerah dalam melaksanakan kebijakan RB. Penilaian dilakukan secara kolaboratif pada tingkat terimplementasinya kebijakan (<i>immediate outcomes</i>) oleh para instansi pengampu kebijakan dan capaian sasaran strategis yang merupakan outcomes dari implementasi kebijakan (<i>intermediate outcomes</i>).		Kementerian PANRB	
22.	Meningkatnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	Indikator yang mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan dapat mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran APBN/APBD pada pemerintah daerah. Penilaian dilakukan dengan melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan SAKIP pada pemerintah daerah.	Penilaian dan penentuan predikat mengacu pada Peraturan MenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Kementerian PANRB	Tim SAKIP
23.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan terhadap kualitas pelayanan dari pemerintah daerah. Penilaian dilakukan dengan melakukan survei eksternal kepada masyarakat penerima layanan.	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan mengacu kepada Peraturan MenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.	Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Bagian Organisasi Setda

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penyesuaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 Hasil Penyesuaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 Hasil Penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja Anggaran (RKA), menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Penjelasan/formula perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab Data
24.	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa pada kriteria yaitu: 1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; 2. kecukupan pengungkapan (<i>adequate disclosures</i>); 3. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; 4. efektivitas sistem pengendalian intern.	Pemberian opini sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.	Laporan BPK	BPKA

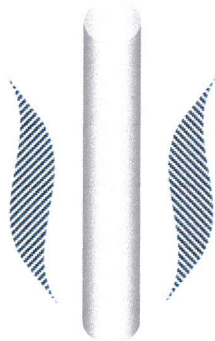
Pj. BUPATI BARITO UTARA,



MUHLIS



PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024



**MUARA TEWEH
2024**



BUPATI BARITO UTARA

PERJANJIAN KINERJA 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUHLIS**
Jabatan : **Pj. BUPATI BARITO UTARA**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Muara Teweh, 17 Januari 2024.

Pj. BUPATI BARITO UTARA,



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KABUPATEN BARITO UTARA

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target
1.	Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah	Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah	%	92,23
2.	Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung listrik	Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik	%	95,15
3.	Menurunnya desa/kelurahan blankspot	Persentase desa/kelurahan blankspot	%	0,00
4.	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,61
		Angka melek huruf	%	99,7
5.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,32
6.	Meningkatnya sektor pertanian	PDRB sektor pertanian	Juta rupiah	672.597,9
7.	Meningkatnya sektor perikanan	PDRB sektor perikanan	Juta rupiah	191.262,8
8.	Meningkatnya sektor perkebunan	PDRB sektor perkebunan	Juta rupiah	397.068,6
9.	Meningkatnya sektor koperasi dan UKM	PDRB sektor koperasi dan usaha kecil menengah	Juta rupiah	160.676,1
10.	Meningkatnya sektor perdagangan	PDRB sektor perdagangan	Juta rupiah	750.936,7
11.	Meningkatnya sektor industri	PDRB sektor industri	Juta rupiah	986.408,6
12.	Meningkatnya daya saing pariwisata	Persentase kunjungan wisata	%	80
13.	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Angka pengangguran terbuka	%	3,43
14.	Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran perkapita pertahun	Juta rupiah	9.993
15.	Meningkatnya penanganan masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mandiri	%	22,05
16.	Meningkatnya ketertiban masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)	%	87,5
17.	Meningkatnya penanganan konflik	Persentase kasus konflik yang tertangani	%	80

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target
18.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	73,64
19.	Menurunnya stunting	Angka Prevalensi Stunting	%	16,21
20.	Menurunnya kemiskinan	Persentase penduduk miskin	%	4,03
21.	Meningkatnya penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori (nilai)	B (60,01)
22.	Meningkatnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	Kategori (nilai)	B (65)
23.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat (nilai)	B (77)
24.	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	Predikat (opini ke-)	WTP (1)

No.	Program	Anggaran
1	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 371.651.936.080
2.	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Rp 4.324.192.400
3.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 7.258.288.500
4.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 23.694.054.000
5.	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 253.475.537.925
6.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp. 764.959.700
7.	Program Pengendalian Bahasa dan Sastra	Rp. 400.000.000
8.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan	Rp. 78.601.623.031
9.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 419.211.000
10.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp. 735.619.000
11.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 417.436.400
12.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 311.315.000
13.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 2.514.760.824
14.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp. 107.519.000
15.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil perikanan	Rp. 206.438.725
16.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp. 38.259.936.075
17.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.	Rp. 1.504.796.885
18.	Program Perizinan Usaha Pertanian.	Rp. 714.999.275

No.	Program	Anggaran
19.	Program Penyuluhan Pertanian.	Rp. 527.512.425
20.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1.500.000.000
21.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 1.250.109.000
22.	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 2.894.289.250
23.	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 395.159.775
24.	Program Perencanaan dan Pembangunan industri	Rp. 1.373.016.600
25.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 126.174.000
26.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 22.216.000
27.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 21.346000
28.	Program Promosi Penanaman Modal Peyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 500.000.000
29.	Program Pelayanan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 700.000.000
30.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 400.280.000
31.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 200.000.000
32.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 1.800.000.000
33.	Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 762.000.000
34.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp. 15.000.000
35.	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp. 50.000.000
36.	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Rp. 215.000.000
37.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp. 20.000.000
38.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp. 70.000.000
39.	Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 19.778.650.000
40.	Program Pemasaran Pariwisata	Rp. 24.920.000
41.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp. 2.957.606.500
42.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing	Rp. 538.582.500

No.	Program	Anggaran
43.	Kepemudaan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp. 9.154.458.000
44.	Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat	Rp. 335.000.000
45.	Program Peningkatan Keamanan dan Lingkungan	Rp. 210.066.600
46.	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 275.000.000
47.	Program peningkatan Kewaspadaan Nasional dan peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp. 2.878.661.500
48.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 3.807.800.000
49.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 3.301.407.600
50.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 584.692.400
51.	Program Penanganan Bencana	Rp. 1.941.581.000
52.	Program Penataan Desa	Rp. 145.000.000
53.	Penataan Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 1.351.120.625
54.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 1.789.457.000
55.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	Rp. 1.497.000.000
57.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.	Rp. 2.103.313.500
58.	Program Perekonomian dan Pembangunan.	Rp. 1.205.400.625
59.	Program Kepegawaian Daerah	Rp. 1.077.096.200
60.	Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 2.850.000.000
61.	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 1.050.000.000
62.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 2.544.845.175
63.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 896.714.375
64.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 379.115.075
65.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 4.542.428.375
66.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 1.051.901.000

Muara Teweh, 17 Januari 2024.

Pj. BUPATI BARITO UTARA,



MUHLIS

RENCANA AKSI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Program	Anggaran	Penanggung Jawab
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV			
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah	%	-	-	-	92,23	Program Penyelenggaraan Jalan	371.651.936.080	Dinas PUPR
								Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	4.324.192.400	Dinas Perhubungan
2.	Meningkatnya Infrastruktur perdesaan dan pengembangan jaringan listrik kelistrikan serta energi lainnya	Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik	%	-	-	-	95,15	Program Perekonomian dan Pembangunan (Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam)	400.000.000	Sekretariat Daerah
3.	Berkembangnya jaringan telekomunikasi dan informasi	Persentase desa/kelurahan <i>blankspot</i>	%	-	-	-	0	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	7.258.288.500	DiskominfoSandi
								Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	23.694.054.000	DiskominfoSandi
4.	Meningkatnya minat wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Rata-rata lama sekolah	Tahun	-	-	-	8,61	Program Pengelolaan Pendidikan	253.475.537.925	Dinas Pendidikan
		Angka melek huruf	%	-	-	-	99,7	Program Pengendalian Bahasa dan Sastra	400.000.000	Dinas Pendidikan
5.	Meningkatnya fasilitas pendidikan dan tenaga pendidik	Rasio tenaga pendidik terhadap murid	%	-	-	-	15,15	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	764.959.700	Dinas Pendidikan
6.	Meningkatnya fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, manajemen dan pelayanan bidang kesehatan	Angka Harapan Hidup	Tahun	-	-	-	71,32	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan	78.601.623.031	Dinas Kesehatan
								Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	419.211.000	Dinas Kesehatan
								Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	735.619.000	Dinas Kesehatan
								Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	417.436.400	Dinas Kesehatan
7.	Meningkatnya produksi, penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana serta pemasaran hasil pertanian	PDRB sektor pertanian	Juta rupiah	-	-	-	672.597,90	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	38.259.936.075	Dinas Pertanian
								Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.	364.999.650	Dinas Pertanian
								Program Penyuluhan Pertanian.	527.512.425	Dinas Pertanian
								Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1.500.000.000	Dinas PUPR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Program	Anggaran	Penanggung Jawab
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV			
8.	Meningkatnya produksi, penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana serta pemasaran hasil perikanan	PDRB sektor perikanan	Juta rupiah	-	-	-	191.262,80	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	311.315.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
								Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.514.760.824	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
								Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	107.519.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
								Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil perikanan	206.438.725	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
9.	Meningkatnya produksi, penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana serta pemasaran hasil perkebunan	PDRB sektor perkebunan	Juta rupiah	-	-	-	397.068,60	Program Perizinan Usaha Pertanian.	714.999.275	Dinas Pertanian
								Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.	1.139.797.235	Dinas Pertanian
10.	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi, UKM dan peningkatan/pengembangan perdagangan dan industri	PDRB sektor koperasi dan usaha kecil menengah	Juta rupiah	-	-	-	160.676,10	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	22.216.000	Disnakertrankop-UKM
								Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	21.346.000	Disnakertrankop-UKM
		PDRB sektor perdagangan	Juta rupiah	-	-	-	750.936,70	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.250.109.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
								Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	2.894.289.250	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
								Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	395.159.775	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		PDRB sektor industri	Juta rupiah	-	-	-	986.408,60	Program Perencanaan dan Pembangunan industri	1.373.016.600	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
11.	Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Angka pengangguran terbuka	%	-	-	-	3,43	Program Penempatan Tenaga Kerja	126.174.000	Disnakertrankop-UKM
		Pendapatan Perkapita Penduduk	Juta rupiah	-	-	-	54,26	Program Promosi Penanaman Modal Peyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000	DPMPSTP

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Program	Anggaran	Penanggung Jawab
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV			
								Program Pelayanan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	700.000.000	DPMPTSP
								Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	400.280.000	DPMPTSP
								Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	DPMPTSP
12.	Berkembangnya pemasaran pariwisata, destinasi pariwisata dan kemitraan	Kunjungan wisata	%	-	-	-	80	Program Pemasaran Pariwisata	24.920.000	Disbudparpora
								Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2.957.606.500	
13.	Meningkatnya kesempatan kerja dan penciptaan iklim usaha yang kondusif	Angka pengangguran terbuka	%	-	-	-	3,43	Program Penempatan Tenaga Kerja	126.174.000	Disnakertrankop-UKM
		Pengeluaran perkapita pertahun	Juta rupiah	-	-	-	9.993	Program Promosi Penanaman Modal Peyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000	DPMPTSP
								Program Pelayanan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	700.000.000	DPMPTSP

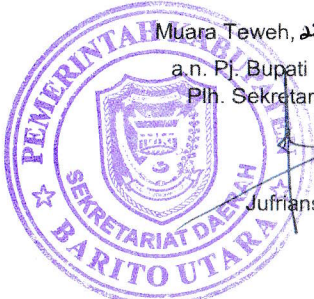
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Program	Anggaran	Penanggung Jawab
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV			
								Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	400.280.000	DPMPSTSP
								Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	DPMPSTSP
14.	Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mandiri	%	-	-	-	22,05	Program Pemberdayaan Sosial	3.807.800.000	Dinas Sosial PMD
								Program Rehabilitasi Sosial	3.301.407.600	Dinas Sosial PMD
								Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	584.692.400	Dinas Sosial PMD
								Program Penanganan Bencana	1.941.581.000	Dinas Sosial PMD
15.	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan serta penanganan konflik dan pengembangan wawasan kebangsaan dan politik	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)	%	-	-	-	87,5	Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat	335.000.000	Satpol PP
								Program Peningkatan Keamanan dan Lingkungan	210.066.600	Satpol PP
								Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	275.000.000	Satpol PP
		Persentase kasus konflik yang tertangani	%	-	-	-	80	Program peningkatan Kewaspadaan Nasional dan peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	2.878.661.500	Bakesbangpol
16.	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam serta pengendalian pencemaran/perusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	-	-	-	73,64	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1.800.000.000	DLH
								Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	762.000.000	DLH
								Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	15.000.000	DLH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Program	Anggaran	Penanggung Jawab
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV			
								Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	50.000.000	DLH
								Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	215.000.000	DLH
								Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	20.000.000	DLH
								Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	70.000.000	DLH
								Program Pengelolaan Persampahan	19.778.650.000	DLH
17.	Menurunnya Angka Stunting	Persentase menurunnya angka stunting	%	-	-	-	16,21	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan	78.601.623.031	Dinas Kesehatan
								Program Pembinaan Keluarga Berencana	354.367.094	Dsidalduk KB P3A
								Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	4.505.390.109	Dsidalduk KB P3A
								Program Perlindungan Perempuan	310.000.500	Dsidalduk KB P3A
								Program Peningkatan Kualitas Keluarga	188.412.500	Dsidalduk KB P3A
								Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	80.000.000	Dsidalduk KB P3A
								Program Pemenuhan Hak Anak	79.137.600	Dsidalduk KB P3A
								Program Perlindungan Khusus Anak	260.862.400	Dsidalduk KB P3A
18.	Menurunnya angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim	Persentase menurunnya kemiskinan dan kemiskinan ekstrim	%	-	-	-	4,03	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	584.692.400	Dinas Sosial PMD
								Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan	78.601.623.031	Dinas Kesehatan
								Program Pengelolaan Pendidikan	253.475.537.925	Dinas Pendidikan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Program	Anggaran	Penanggung Jawab
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV			
								Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.674.182.372	Disperkimtan
								Program Kawasan Permukiman	2.165.148.275	Disperkimtan
								Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	22.216.000	Disnakertrankop-UKM
								Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	21.346.000	Disnakertrankop-UKM
								Program Penempatan Tenaga Kerja	126.174.000	Disnakertrankop-UKM
								Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	311.315.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
								Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.514.760.824	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
								Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	38.259.936.075	Dinas Pertanian
								Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1.500.000.000	Dinas PUPR
								Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum	2.889.190.000	Dinas PUPR
19.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori (nilai)	-	-	-	B (60,01)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kegiatan Penataan Organisasi)	1.497.000.000	Sekretariat Daerah
								Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	2.103.313.500	Sekretariat Daerah
								Program Perekonomian dan Pembangunan.	1.205.400.625	Sekretariat Daerah
								Program Kepegawaian Daerah	1.077.096.200	BKPSDM
								Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.850.000.000	Inspektorat
								Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1.050.000.000	Inspektorat
20.	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	Kategori (nilai)	-	-	-	B (65)	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.544.845.175	Bappedalitbang

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Program	Anggaran	Penanggung Jawab
				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV			
								Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	896.714.375	Bappedalitbang
								Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.850.000.000	Inspektorat
								Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (subkegiatan Peningkatan Kinerja dan RB)	580.000.000	Sekretariat Daerah
21.	Meningkatnya Pengelolaan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat (nilai)	-	-	B (77)	-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Subkegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana)	407.000.000	Sekretariat Daerah
								Program Pendaftaran Penduduk	304.133.250	Dsidukcapil
								Program Pencatatan Sipil	106.313.800	Dsidukcapil
								Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	185.280.900	Dsidukcapil
								Program Pengelolaan Profil Kependudukan	27.500.000	Dsidukcapil
								Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	DPMPSTP
22.	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah berbasis elektronik	Opini BPK	Predikat (opini ke-)	-	-	-	WTP (1)	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	4.542.428.375	BPKA
								Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.051.901.000	BPKA
								Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.850.000.000	Inspektorat

Muara Teweh, 27 Maret 2024
a.n. Pj. Bupati Barito Utara
Plh. Sekretaris Daerah,
Jufriansyah





PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

2025